



KARENA RESILIENSI ITU LOKAL

LAPORAN SINTESIS PEMBELAJARAN REGIONAL INDO-PASIFIK
TENTANG COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENANGGULANGAN DAN RESILIENSI BENCANA

“

Saya pikir modal sosial dan kearifan tradisional sangat penting dalam hal ini, bahkan dalam menanggulangi COVID-19, kita sangat membutuhkan kearifan dan pemimpin lokal untuk mencapai resiliensi bencana yang berkelanjutan.



**Raditya Jati - Deputi Bidang Sistem dan Strategi,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**

”

Dokumen ini memberikan sintesa hasil dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama tahun 2021.

KARENA RESILIENSI ITU LOKAL

LAPORAN SINTESIS PEMBELANJARAN REGIONAL INDO-PASIFIK
TENTANG COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENANGGULANGAN DAN RESILIENSI BENCANA

UCAPAN TERIMA KASIH

Produksi Laporan Sintesis ini dimungkinkan oleh partisipasi sekitar 500 multi-pemangku kepentingan dari seluruh wilayah di Indo-Pasifik dan sekitarnya, melalui rangkaian tujuh sesi pembelajaran yang berlangsung antara bulan Juni dan Desember 2021, dan dijelaskan secara rinci dalam laporan. Para pemangku kepentingan manajemen bencana yang bergabung dalam proses pembelajaran berasal dari Australia, Bangladesh, Brunei-Darussalam, Kamboja, Fiji, India, Indonesia, Iran, Jepang, Lao PDR, Malawi, Malaysia, Nepal, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Swiss, Thailand, Timor Leste, Amerika Serikat, Vanuatu, Vietnam, Sekretariat ASEAN, Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Manajemen Bencana, dan jaringan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penulis:

Laporan ini ditulis oleh Kanjeng Pangeran Notonegoro, Said Faisal dan Oliver Lacey-Hall.

Kontributor:

Pembicara di enam webinar dan penulis dari enam makalah pendek yang dipresentasikan dalam Simposium yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2021, memberikan bukti dan analisis yang menyediakan informasi dalam penyusunan laporan. Kontribusi dari Adelina Kamal, Direktur Eksekutif, Pusat Koordinasi Asean untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA) Pusat; Agung Yudhawanata, Direktur Indonesia dan Malaysia, Twitter; Andrew Schroeder, Wakil Presiden Penelitian dan Analisis, Bantuan Langsung, AS; Anne Barker, Koresponden Indonesia, Australian Broadcasting Corporation; Bernadia Irawati Tjandradewi, Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific; Daniel Daud Kameo, Penasihat Eksekutif Gubernur Nusa Tenggara Timur, Indonesia; Faizal Perdaus, Presiden, Mercy Malaysia; Faizal Thamrin, Penasihat Data Kemanusiaan, Pulse Lab Jakarta; Fatma Lestari M.Si. PhD, Direktur, Pengurangan Risiko Bencana, Universitas Indonesia; Gabrielle Emery, Manajer Hukum Bencana Asia Pasifik, Federasi Internasional Palang Merah dan Red Crescent; Jane Thomason, Pendiri, SuperNova Data dan Blockchain dan Pakar Teknologi yang Disruptive, Australia; Jemilah Mahmood, Penasihat Senior Perdana Menteri Malaysia untuk Kesehatan Masyarakat; Jo-Hannah Lavey, Eksekutif, Humanitarian Advisory Group, Australia; Josefa Lalabalavu, Koordinator Manajemen Risiko Bencana Pasifik (DRM), Plan International; Lan Mercado, Direktur Regional untuk Asia, OXFAM; Markus Werne, Kepala Kantor, OCHA Asia Pasifik; Nghia Trong Trinh, Regional Resillience and Safe Schools Specialist, Plan International; Noudhy Valdryno, Manajer Politik dan Penjangkauan Pemerintah, Facebook Asia-Pasifik; Pannapa Na Nan (Aimee), Direktur, Bagian Kerjasama Internasional, Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Thailand; Petrarca Karetji, Pimpinan Pulse Lab Jakarta; Raditya Jati, Deputy Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indonesia; Rahmawati Hussein, Muhammadiyah Disaster Management Centre Indonesia dan Anggota Kelompok Penasihat CERF; Rene S. Meily, President Phillipine Disaster Foundation, Inc; Shinta Arshinta, Direktur Unit Pengembangan Masyarakat dan Kemanusiaan YAKKUM; dan Victoria Saez-Omenaca, Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Indonesia, serta dukungan, saran dan keterlibatan yang diberikan oleh tim program SIAP SIAGA.

Design Laporan: MediaArt Indonesia

Sanggahan:

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri Dan Perdagangan. Pandangan atau opini dalam publikasi ini merupakan perwakilan dari tim penulis, dan tidak mewakili pandangan dari Pemerintah Australia.

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
1. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	1
Tentang Tata Kelola	3
Tentang Model Kemitraan	3
Tentang Teknologi dan Komunikasi	4
2. AUSTRALIA DAN INDONESIA - Mendukung Pembelajaran Regional	7
3. Tahapan Pembelajaran	9
4. Penanggulangan Bencana, Resiliensi Bencana dan Pelokalan Selama COVID-19	17
5. Mengapa Perlu Fokus pada Resiliensi Bencana di Tingkat Lokal?	21
6. Temuan tentang Pelokalan	27
6.1 Hambatan untuk Perubahan	29
6.2 Pendorong Perubahan	34

“

*Bisnis seperti biasa tidak lagi menjadi pilihan.
Belajar dari pandemi COVID-19, kita harus mulai mengevaluasi dan meninjau kembali cara kerja kita dalam agenda kemanusiaan, termasuk dalam bidang penanggulangan bencana.*



**Achsanul Habib - Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan,
Kementerian Luar Negeri RI**

”

Ringkasan Eksekutif

“Pandemi adalah momen bersejarah. Satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah berkolaborasi dan membangun kemitraan yang lebih kuat – tidak selalu memulai sesuatu baru – tetapi memanfaatkan keterampilan dan kapasitas yang telah ada melalui berbagai cara yang inovatif.”

Arshinta, Direktur Pengembangan Kesehatan Masyarakat dan Kemanusiaan Yakkum Emergency Unit – sebuah LSM lokal yang berbasis di Yogyakarta, Indonesia – membuat pernyataan ini selama proses pembelajaran regional Indo-Pasifik 2021 tentang COVID-19 dan dampaknya terhadap penanggulangan dan resiliensi bencana. Pengamatannya sesuai dengan temuan utama laporan ini yang menunjukkan bahwa meskipun tidak banyak pendekatan yang benar-benar baru untuk penanggulangan dan resiliensi bencana, pandemi telah menegaskan kembali betapa mendesak perlunya melakukan perubahan yang telah ditetapkan berbagai perjanjian internasional, regional dan kebijakan nasional.

Gagasan untuk mengakui pentingnya kapasitas, sistem, dan tradisi penanggulangan bencana di tingkat lokal sekali lagi muncul sebagai salah satu dari dua kesimpulan utama laporan ini. Temuan ini tentu bukan hal baru. Hal ini telah ditetapkan dalam Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana dan telah lama dibahas pada *World Humanitarian Summit* di tahun 2016 yang menghasilkan kesepakatan “*Grand Bargain*.” Namun, proses pembelajaran ini menawarkan tiga perspektif baru.

Pertama adalah pelokalan sebagai hal **yang tidak dapat ditawar lagi** bagi para pelaku penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan di semua tingkatan. Dengan terbatasnya pergerakan karena pandemi, masyarakat lokal harus mengandalkan kapasitas dan sumber daya mereka sendiri dalam merespons dampak bencana selama pandemi. Sejumlah faktor telah diselidiki secara mendalam dalam laporan ini; termasuk factor-faktor yang menghambat pelokalan serta beberapa tren yang muncul yang dapat membantu mempercepat pelokalan.

Kedua adalah pertanyaan “**harus seberapa lokal?**” Pengertian kata “lokal” berbeda antara satu aktor dengan aktor lainnya. Sementara itu, pembelajaran dari pandemi ini jelas menyoroti pentingnya kepemimpinan lokal, kemitraan lokal dan pendanaan untuk pelaku penanggulangan bencana di tingkat lokal. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita harus mengambil upaya kolektif untuk mendukung kapasitas penanggulangan bencana di tingkat lokal, sedekat mungkin dengan masyarakat yang terkena dampak. Laporan sintesis ini menyoroti beberapa contoh pengalaman lokal terkait penanggulangan bencana selama pandemi dan memberikan perspektif baru kepada komunitas penanggulangan bencana tentang cara menentukan sasaran untuk upaya pelokalan yang lebih baik.

Ketiga berkaitan dengan resiliensi dan bagaimana penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan dapat meningkatkan resiliensi bencana, terutama untuk mengantisipasi peristiwa masa depan seperti pandemi COVID-19. Sekali lagi, meskipun ini bukan hal baru, laporan ini menawarkan perspektif baru tentang pendekatan resiliensi bencana. Menggunakan definisi “resiliensi bencana” yang diberikan oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) sebagai dasar, laporan ini menunjukkan dinamika dalam peningkatan resiliensi bencana, dengan titik konvergensi yang berbeda dari satu situasi ke situasi lainnya. Laporan ini menawarkan prinsip pemodelan sederhana tentang bagaimana menilai, di mana dan kapan resiliensi bencana perlu ditingkatkan.

Walaupun sebagian besar pembaca telah terbiasa dengan gagasan membangun resiliensi bencana melalui upaya dan proses yang sistematis dan terprogram, rangkaian pembelajaran ini mengungkap variabel seputar modal sosial dan budaya sebagai faktor penentu tambahan untuk memahami resiliensi bencana. Variabel-variabel ini berasal dari pengakuan terhadap resiliensi bencana sebagai sifat yang dimiliki manusia di semua tingkat struktur sosial, dari individu ke komunitas lokal hingga seluruh umat manusia. Menurut laporan ini, salah satu kekurangan dalam penjelasan konsep umum resiliensi bencana di masa lalu adalah terbatasnya pelibatan dan pengakuan tentang pentingnya modal budaya dan sosial lokal yang ada sebagai fondasi untuk meningkatkan resiliensi bencana.

Sebagai hasil dari proses pembelajaran selama hampir satu tahun serta diskusi dan validasi yang luas yang melibatkan berbagai ahli dan praktisi penanggulangan bencana dan urusan kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik, laporan ini bertujuan untuk menawarkan perspektif baru tentang pendekatan resiliensi bencana bagi para pembuat kebijakan dan praktisi. Hal ini sangat penting untuk Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR*) yang akan datang di Bali. Laporan sintesis ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang signifikan dari Pemerintah Indonesia dan Australia terhadap wacana global tentang resiliensi bencana dengan menggunakan pengalaman menghadapi pandemi di kawasan ini sebagai dasar analisis.

Sudah selayaknya acara *Global Platform for Disaster Risk Reduction* dan Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik tentang Pengurangan Risiko Bencana (*Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction*) tahun 2022 diselenggarakan oleh kedua pemerintah yang memimpin proses pembelajaran ini. Lebih lanjut, Bali yang juga terkenal dengan kekayaan budayanya yang dapat menekankan pentingnya pendekatan resiliensi bencana di tingkat lokal dengan mempertimbangkan budaya lokal dan modal sosial. Mengapa? **“Karena Resiliensi itu Lokal.”**

April 2022

“

Di beberapa kejadian, kita melihat sosial media dipakai sebagai sarana memobilisasi bantuan atau memitigasi bencana. Ada banyak inisiatif yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh media konvensional.



Agung Yudhawanata - Director for Indonesia and Malaysia, Twitter

”

1 | Kesimpulan dan Rekomendasi

Diskusi yang hidup dan luas dalam webinar dan simposium ini berfokus pada realitas persiapan, respons, dan pemulihan bencana dalam konteks COVID-19. Rekomendasi yang berasal dari enam makalah akademis yang disiapkan untuk simposium ini menggemakan seruan untuk fokus yang lebih besar pada pelokalan di semua tingkat. Rekomendasi utama dirangkum di bawah ini.

Hasil dari proses pembelajaran ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Bahkan dengan momentum besar dan peluang transformasi yang disediakan oleh pandemi global, masalah yang mengakar, yang sudah berlangsung lama, serta sistemik seputar penanggulangan bencana, pelokalan, aksi kemanusiaan, dan resiliensi bencana masih kita hadapi dan kemajuan kita masih lambat.

Dampak pandemi telah memperkuat temuan dari diskusi kebijakan, studi, dan tinjauan penanggulangan bencana dan sistem kemanusiaan selama dekade terakhir. Rekomendasi pemangku kepentingan penanggulangan bencana dari semua “tingkat” sistem yang disertakan di bawah ini memberikan dorongan untuk menangkap peluang perubahan yang telah disediakan oleh pandemi serta momentum yang dihasilkan oleh adaptasi cepat.

Singkatnya, proses pembelajaran ini mengidentifikasi enam kesimpulan dan tiga belas rekomendasi yang terpisah namun saling berkaitan.

Keenam kesimpulan:

- i. **Pandemi ini menyoroti resiliensi bencana yang melekat pada masyarakat terhadap guncangan dan oleh karena itu diperlukan fokus yang lebih besar pada resiliensi lokal oleh pemangku kepentingan penanggulangan bencana.** Aktor lokal dengan cepat menanggapi kebutuhan yang muncul, bekerja secara sinergis dengan masyarakat dan otoritas lokal dan dengan demikian memperkuat prinsip “selokal mungkin; seinternasional yang diperlukan”. Pemangku kepentingan penanggulangan bencana di tingkat lain, meskipun masih aktif dan sangat inovatif, tidak dapat mengerahkan personil ke lapangan dalam jumlah besar untuk memberikan bantuan.
- ii. **Untuk mencapai resiliensi bencana di tingkat lokal yang lebih besar dan kuat, aktor nasional, regional, dan internasional perlu mengubah model operasi mereka secara signifikan menjadi model tata kelola yang dapat mendorong, memberdayakan, dan mempercepat pelokalan.** Untuk mencapai resiliensi bencana di tingkat lokal yang lebih besar dan kuat, pelokalan perlu didukung dengan lebih baik. Aktor nasional, regional dan internasional perlu secara signifikan mengubah model operasi mereka untuk memastikan agar masyarakat lokal – baik yang tinggal di perkotaan atau pedesaan – mendapat dukungan yang memadai dalam peran mereka di lini depan serta pengakuan yang layak atas kepemimpinan mereka demi meningkatkan resiliensi bencana yang telah melekat pada mereka atau kemampuan untuk bangkit kembali semaksimal mungkin.

- iii. **Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana ditentukan oleh tingkat resiliensi yang dicapai oleh komunitas atau masyarakat lokal untuk mengatasi bencana.** Pelokalan penanggulangan bencana perlu dipercepat. Pandemi ini telah membatasi bantuan internasional, regional, dan, dalam beberapa kasus, bantuan nasional untuk masyarakat lokal ketika mereka menghadapi dampak pandemi dan bencana lainnya pada saat yang sama. Pengalaman dari sejumlah komunitas telah menunjukkan bagaimana mereka berjuang menghadapi bencana tanpa adanya bantuan dari luar. Namun dalam perjuangan tersebut, masyarakat juga telah menemukan cara baru untuk memanfaatkan potensi mereka sendiri untuk mengatasi bencana.
- iv. **Memahami modal sosial dan budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat adalah langkah awal untuk memperkuat resiliensi bencana.** Satu-satunya cara untuk memastikan masyarakat lokal dapat menghadapi dampak bencana selama pandemi adalah dengan meningkatkan resiliensi bencana di tingkat individu dan komunitas serta menyediakan lingkungan pendukung untuk mengenali modal sosial dan budaya mereka sendiri dan memaksimalkan penggunaan modal tersebut untuk meningkatkan resiliensi mereka. Pemulihan pasca-pandemi harus dikelola sedemikian rupa sehingga mencakup pembelajaran masyarakat selama pandemi terutama tentang peningkatan kemandirian karena keterbatasan dalam melibatkan orang-orang dari “luar” komunitas mereka. Dengan cara ini, pemulihan pandemi dapat dikelola tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.
- v. **Teknologi digital dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan penanggulangan bencana dan meningkatkan resiliensi bencana – jika disesuaikan dengan konteksnya.** Penyerapan teknologi merupakan aspek yang semakin penting dalam upaya meningkatkan resiliensi bencana di tingkat lokal. Penggunaan aplikasi virtual seperti Zoom, dan berbagai aplikasi informasi (dan ritel) daring telah memungkinkan masyarakat lokal untuk mengakses pengetahuan dan keahlian global, yang merupakan salah satu nilai tambah terbaik yang dapat ditawarkan oleh organisasi internasional dan regional kepada masyarakat lokal. Namun, penggunaan teknologi ini untuk mendukung penanggulangan bencana tidak akan cukup jika tidak disesuaikan dengan konteks lokal. Jika memungkinkan, berbagai aplikasi tersebut harus disesuaikan dengan praktik-praktik yang sudah tertanam dalam budaya dan adat setempat. Dalam menerapkan teknologi, selalu penting untuk membangun modal sosial dan budaya masyarakat yang telah ada, dengan mempertimbangkan resiliensi bencana yang telah mereka miliki sebelumnya.
- vi. **Resiliensi bencana adalah hasil konvergensi antara upaya dan proses sistematis yang diselenggarakan oleh negara dan modal sosial dan budaya yang dimiliki oleh komunitas atau masyarakat.** Pemulihan yang berhasil membutuhkan pengakuan akan hubungan antara dampak dan efek bencana, mekanisme penanggulangan dan langkah-langkah adaptasi oleh mereka yang terkena dampak serta inisiatif program pemulihan yang mempertimbangkan faktor-faktor ini. Mengenali ciri-ciri resiliensi bencana yang melekat pada suatu komunitas dan meningkatkannya adalah kunci bagi keberlanjutan resiliensi bencana masyarakat.

Berikut adalah tiga belas rekomendasi yang dihasilkan simposium ini sesuai tiga bidang penelitian yang diidentifikasi oleh proses pembelajaran sebagai prioritas utama:

TENTANG TATA KELOLA

- i. **Prioritaskan pemikiran sistem di semua tingkat dan kegiatan dengan fokus utama pada peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana.** Kompleksitas tantangan masa depan yang dihadapi kawasan ini belum diimbangi dengan sistem yang telah ada saat ini untuk penanggulangan bencana, aksi kemanusiaan, perubahan iklim, dan masalah lingkungan hidup.
- ii. **Tingkatkan sumber daya dan kapasitas otoritas lokal.** Otoritas lokal berada di lini depan dalam memimpin perang melawan pandemi dan memperkuat resiliensi masyarakat terhadap bencana di tingkat lokal, namun mereka masih kekurangan sumber daya dan kapasitas. Meskipun ada perbedaan yang signifikan antar negara di kawasan ini, secara umum pandemi telah memfasilitasi pergeseran paradigma tentang peran otoritas lokal dalam penanggulangan bencana dan peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana.
- iii. **Bila diperlukan peraturan harus ditetapkan untuk menjamin komplementaritas antara peraturan perundang-undangan kedaruratan kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana.** Peraturan perundang-undangan adalah tulang punggung bagi pemerintah untuk beroperasi dan pandemi telah memberikan kesempatan untuk meninjau kembali relevansi, koherensi, dan komplementaritas legislasi yang relevan. Krisis telah memberikan peluang untuk mempercepat perubahan, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang kurang selaras dengan realitas abad kedua puluh satu. Kesehatan masyarakat dapat mencatat dan memanfaatkan kemajuan yang dicapai di kawasan ini, terutama sejak tahun 2005, dalam pengembangan kerangka peraturan penanggulangan bencana dan fokusnya untuk mendukung masyarakat meningkatkan resiliensi mereka terhadap bencana.

TENTANG MODEL KEMITRAAN

- i. **Upaya yang lebih besar harus dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas kepemimpinan sehingga menghasilkan lebih banyak pemimpin penanggulangan bencana di tingkat lokal yang terlatih yang mampu terlibat dan memfasilitasi pemangku kepentingan mereka dalam visi bersama yang fokus kepada resiliensi bencana dan mempertimbangkan hubungan kemanusiaan/pembangunan/pengurangan risiko.** Model kemitraan yang paling sesuai untuk mendorong resiliensi masyarakat di tingkat lokal adalah yang mengutamakan kepemimpinan lokal dan menempatkan pemerintah daerah dan aktor lokal sebagai pusat pengambilan keputusan. Respons bencana selama pandemi membutuhkan pemikiran ulang model kemitraan dan dinamika kekuasaan, memprioritaskan pemerintah daerah dan mitra non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan operasi.
- ii. **Kemitraan yang adil dan saling menguntungkan adalah dasar untuk kerjasama berkelanjutan yang meningkatkan resiliensi lokal dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan bencana dan sistem kemanusiaan sehingga meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana.** Sejalan dengan komitmen global yang telah berlangsung lama, mereka yang memegang kekuasaan harus lebih menekankan kesetaraan kemitraan di berbagai entitas dan peran, dengan fokus pada pembagian risiko yang lebih baik, penanganan keluhan yang dapat diakses, prinsip saling menghormati, dan hubungan yang jujur untuk semua. Seringkali kemitraan yang telah ada sebelumnya dengan cepat disusun kembali selama pandemi untuk mengatasi serangkaian realitas baru. Pembelajaran dari

pengalaman ini harus didukung dengan rekomendasi untuk menekankan perlunya pembangunan pemahaman, kesadaran, dan praktik yang berkelanjutan di tingkat perorangan dan kelembagaan (termasuk fokus pada keterukuran melalui penyusunan indikator kinerja utama), merundingkan dan menyepakati pedoman kemitraan secara adil, membangun kapasitas lebih lanjut, dan dengan demikian meningkatkan resiliensi masyarakat.

- iii. **Penanggulangan bencana dan badan-badan kemanusiaan harus lebih sepenuhnya menyadari peran yang semakin penting yang dapat dimainkan oleh anak-anak, remaja, pemuda, dan kelompok rentan lainnya sebagai agen lokal serta mempertimbangkan cara terbaik untuk melibatkan mereka dalam kemitraan dalam mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko dan mendukung kesiapsiagaan, respons, serta pemulihan yang efektif.** Bukti tentang peran penting orang-orang yang terkena dampak bencana, anak-anak, remaja, pemuda, dan kelompok rentan lainnya harus ditampilkan. Para mitra non-pemerintah menekankan perlunya menampilkan data yang memenuhi standar (pemilahan data, kualitas, dan validasi) dan bekerja dengan cara yang lebih terkoordinasi dan saling melengkapi untuk membangun contoh berbasis bukti tentang pentingnya mengenali peran penting masyarakat yang terkena dampak bencana sebagai mitra dalam pengelolaan risiko bencana dan peningkatan resiliensi, termasuk anak-anak dan remaja, kelompok termarginalisasi, penyandang disabilitas, dan kelompok berisiko.
- iv. **Para peserta sangat mendukung usulan untuk menjauh dari pendekatan populer “permintaan proposal” dan pendanaan yang dipimpin/ yang didorong oleh donor dan bekerja menuju kemitraan yang lebih adil untuk membangun solusi bersama.** Contohnya termasuk pendekatan penjajakan bersama (penelitian, perencanaan, solusi), desain bersama, dll. Langkah ini akan menghasilkan rasa kemitraan yang lebih kuat daripada budaya kompetitif saat ini dalam sistem penanggulangan bencana dan dapat mengarah pada hasil yang berfokus pada resiliensi yang lebih baik bagi penerima manfaat.
- v. **Bekerja secara terisolasi adalah hambatan tersulit untuk diatasi dalam membangun kemitraan untuk resiliensi bencana di tingkat lokal.** Dalam semangat bekerja lintas penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan dan pembangunan, kemitraan harus bertujuan untuk secara sadar menghindari bekerja secara terisolasi dan memastikan bahwa, contohnya, perencanaan kontinjensi untuk penanggulangan bencana sepenuhnya mengintegrasikan pemulihan dan kebutuhan pembangunan dan prioritas pasca bencana. Menempatkan kepemimpinan dan manajemen di tangan para aktor lokal sehingga mereka adalah pihak yang mengatur agenda dan membuka isolasi.

TENTANG TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI

- i. **Terapkan prinsip-prinsip desain layanan untuk memastikan pengadopsian yang lebih baik.** Desain layanan melihat secara menyeluruh proses dan sumber daya dari ujung ke ujung yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, termasuk memahami kebutuhan pengguna, motivasi dan perilaku mereka serta konteksnya.
- ii. **Prioritaskan upaya untuk menggabungkan interoperabilitas data dengan lebih baik di semua tingkat sistem penanggulangan bencana.** Karena penanggulangan bencana semakin tergantung pada pengumpulan data multi-*stakeholder* dan analisis *big data*, kita perlu bergerak ke arah model yang lebih terpadu untuk interoperabilitas data. Dengan demikian, pendekatan yang disepakati bersama untuk pengembangan *baseline*, seperti definisi, protokol pemilahan data, dan alat dan sistem pengumpulan

data yang sistematis dalam batas-batas administratif yang ditentukan sebelumnya menjadi semakin penting. Proses verifikasi juga perlu diperpendek. Berbagai hal ini harus segera dilakukan.

- iii. **Standarisasi data *sharing*.** Lebih khusus lagi, bukti dari pembelajaran ini menunjukkan perlunya upaya *multi-stakeholder* secara menyeluruh untuk standarisasi *data sharing*. Ada banyak pembelajaran yang sudah terbukti dalam berbagai contoh *data sharing* yang terjadi antara pemerintah dan pihak lain, tetapi ini seringkali tidak berkembang lebih jauh untuk membantu menginformasikan protokol dan proses *data sharing* yang berkelanjutan dan terstandarisasi dalam jangka panjang serta tidak mempertimbangkan kebutuhan *data sharing* secara vertikal maupun horizontal.
- iv. **Komunikasi harus diterima sebagai sarana mitigasi yang membutuhkan upaya kolektif dan terpadu untuk pemantauan media dan mengatasi berita palsu.** Praktisi penanggulangan bencana dan kemanusiaan didorong untuk menggunakan komunikasi sebagai sarana mitigasi ketika informasi yang salah beredar. Ini berarti meningkatkan pemantauan media secara bersama untuk memahami masalah apa yang muncul dan untuk dengan cepat menangani berita palsu. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi *multi-stakeholder* untuk penyampaian pesan yang terkoordinasi, termasuk dengan perwakilan populasi yang terkena dampak bencana.
- v. **Pembuat keputusan dan pakar komunikasi harus memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital untuk meningkatkan literasi penanggulangan bencana dan mempromosikan resiliensi masyarakat terhadap bencana.** Di sisi lain, praktisi harus menggunakan media sosial, seperti WhatsApp, untuk meningkatkan literasi bencana, dengan menghubungkan pesan ke sumber resmi dan mengakses pembuat berita dan *influencer* untuk menyampaikan pesan. Pesan dan kampanye informasi penanggulangan bencana harus inklusif, melibatkan penggunaan sumber media *non-mainstream* dan titik distribusi yang sesuai, contohnya penyediaan pamflet/catatan di ruang publik (kantor desa), pengumuman dari ruang publik (termasuk rumah ibadah), serta melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama. Fokus khusus diperlukan untuk memastikan aksesibilitas bagi populasi yang rentan dan berisiko dan penggunaan media yang tepat untuk penyampaian informasi di luar media elektronik saat ini. Pada saat yang sama, pembuat keputusan dan pakar komunikasi harus sepenuhnya memanfaatkan kekuatan teknologi digital untuk memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam hal komunikasi penanggulangan bencana.

“

Kekayaan budaya, bahasa dan cerita rakyat dapat dijadikan sebagai media untuk menyebarkan informasi bencana dan pandemi kepada masyarakat adat, khususnya orang dengan disabilitas



**Prof. Fatma Lestari M.Si. PhD - Direktur Pusat Pengurangan Risiko Bencana,
Universitas Indonesia**

”

2

Australia dan Indonesia - Mendukung Pembelajaran Regional

Proses pembelajaran regional ini merupakan kerjasama antara Australia dan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran tentang penanggulangan bencana dan resiliensi bencana di kawasan Indo-Pasifik. Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesiapsiagaan Bencana (2019-2024) atau Program SIAP SIAGA bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Australia dan Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik dan resiliensi masyarakat yang terkena bencana dan krisis.

Program SIAP SIAGA,¹ yang didanai oleh Pemerintah Australia sebagai tangan operasional Kemitraan, memiliki hasil yang mencakup penguatan pembelajaran, inovasi, kerjasama dan inklusi untuk penanggulangan bencana. Dengan demikian, pembelajaran tentang dampak COVID-19 terhadap penanggulangan bencana di kawasan Indo-Pasifik yang berasal dari serangkaian acara yang diselenggarakan selama tahun 2021 dan diuraikan dalam laporan ini merupakan prioritas program, sehingga keluaran dari proses tersebut dapat menjadi masukan bagi forum lokal (sub-nasional), nasional, regional dan internasional yaitu *Global Platform for Disaster Risk Reduction* pada bulan Mei 2022, *Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction* bulan September 2022, dan serangkaian Konferensi Regional tentang Bantuan Kemanusiaan (*Regional Conferences on Humanitarian Assistance*) yang sedang berlangsung, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

¹ SIAP SIAGA adalah Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia yang dikelola oleh the Palladium Group. <https://www.siapsiaga.or.id/en/>

“

COVID-19 adalah momen refleksi yang sangat penting bagi saya karena bahkan sebelum pandemi saya sudah berpikir bahwa kita sebagai pekerja kemanusiaan atau pekerja pembangunan selalu berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan mengatasi gejala krisis apa pun yang kita hadapi. Dan kita tidak pernah duduk dan merenungkan mengapa kita berada dalam situasi ini.



**Dr. Jemilah Mahmood - Penasihat Senior Perdana Menteri Malaysia
untuk Kesehatan Masyarakat**

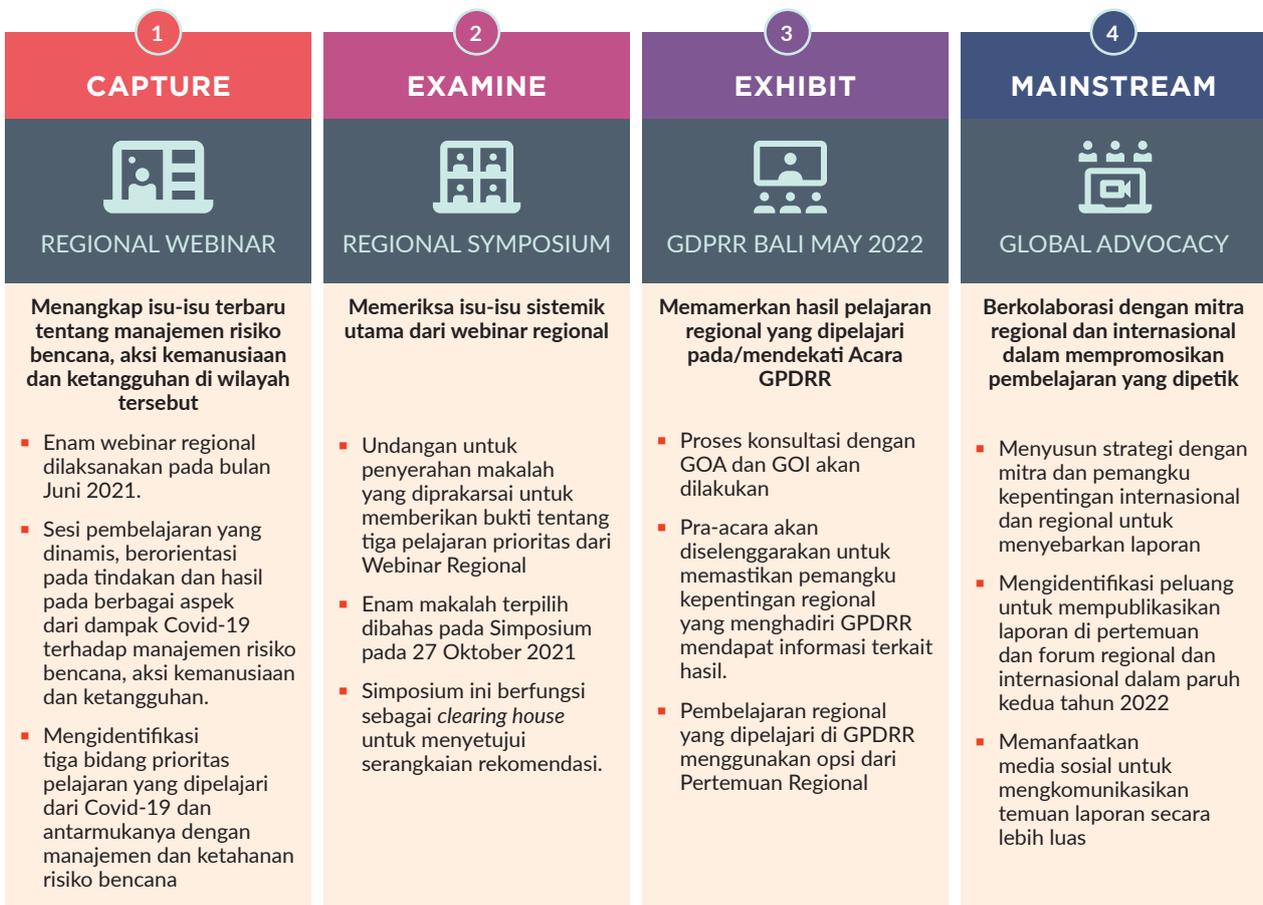
”

3 | Tahapan Pembelajaran

Pembelajaran berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan penanggulangan bencana karena kejadian bencana tidak menunjukkan tanda-tanda mereda di tengah perjuangan melawan pandemi. Pandemi COVID-19 telah memberikan disrupsi yang signifikan pada banyak aspek kehidupan normal kita. Selain meningkatkan kerentanan, proses pembelajaran ini juga menunjukkan bahwa pandemi telah memperkuat resiliensi bencana. Pusat Riset Epidemiologi Bencana/*Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)* mencatat 165 kejadian bencana alam pada tahun 2020 di Asia dan Pasifik pada *Emergency Events Database*. Kejadian tersebut tidak termasuk pandemi. Kombinasi pandemi dan bencana tidak hanya memiliki dampak kesehatan langsung pada populasi di seluruh kawasan ini; ini juga secara serius menantang kemampuan para pelaku kemanusiaan dan tanggap bencana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak secara tepat waktu, efisien, dan efektif.

Serangkaian enam webinar regional dirancang sebagai tahap awal untuk menangkap pembelajaran dari kawasan Indo-Pasifik tentang COVID-19 dan dampaknya terhadap penanggulangan risiko dan resiliensi bencana.

GAMBAR 1. Empat tahapan pembelajaran regional SIAP SIAGA

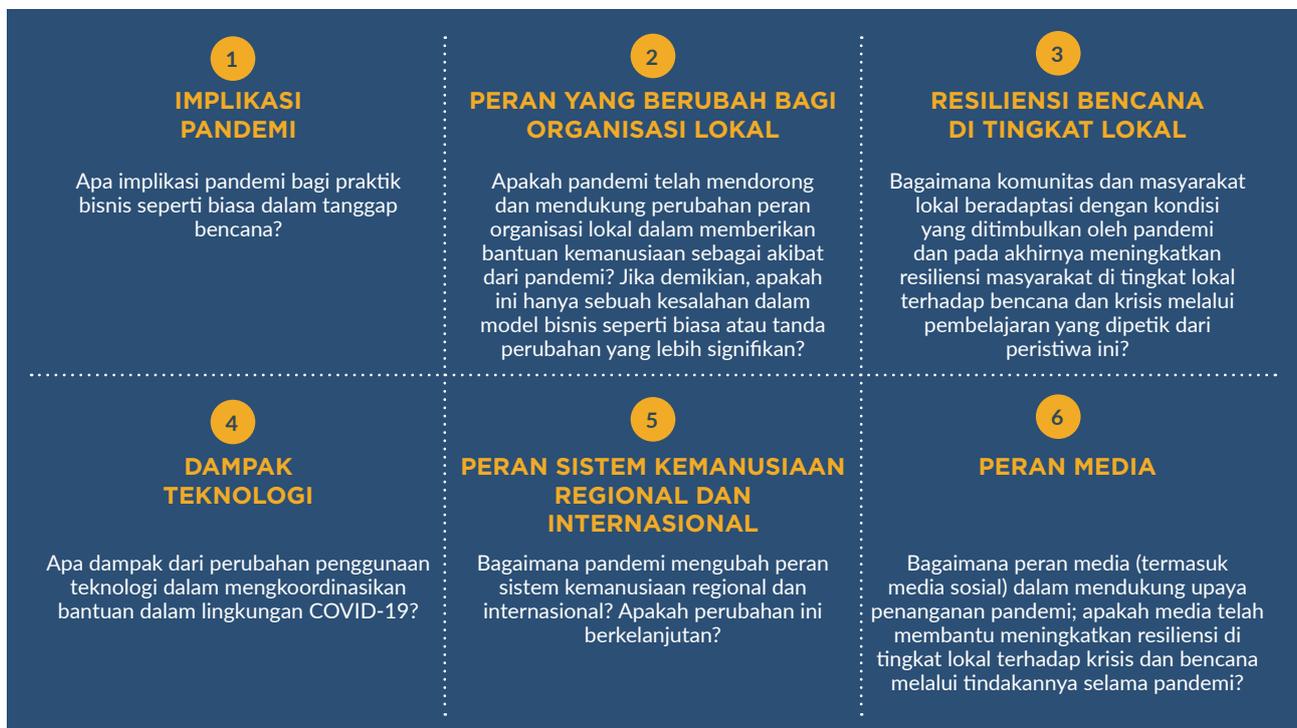


Perpaduan COVID-19 dan bencana alam menimbulkan sejumlah pertanyaan, diantaranya adalah apakah kita dapat secara lebih efektif mengurangi risiko bencana, meningkatkan tata kelola risiko bencana, dan membangun resiliensi bencana yang lebih kuat jika kejadian bencana menjadi lebih kompleks dan lebih sulit diprediksi dibanding sebelum pandemi. Jika jawaban atas pertanyaan tersebut adalah seperti yang diartikulasikan dalam Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana - bahwa kita harus bekerja sama untuk:

“...mencegah dan mengurangi risiko bencana yang ada melalui penerapan langkah-langkah ekonomi, struktural, hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan, teknologi, politik dan kelembagaan yang terintegrasi dan inklusif yang mencegah dan mengurangi paparan bahaya dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan untuk respon dan pemulihan, dan dengan demikian memperkuat resiliensi bencana”

...maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan secara berbeda? Dengan tujuan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan dalam rangka menjelang Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 di Bali, SIAP SIAGA menyelenggarakan rangkaian enam Webinar Regional. Maraton pembelajaran daring yang menantang dan menggugah pikiran selama minggu ketiga dan keempat Juni 2021 ini mengkaji bagaimana pandemi telah memengaruhi kemampuan kawasan ini untuk meningkatkan kesiapsiap-siagaan, merespons, dan pulih dari bencana yang tidak terkait dengan pandemi dan untuk menggali pembelajaran yang kita butuhkan.

GAMBAR 2. Enam bidang penelitian untuk menangkap pembelajaran yang muncul di Kawasan Indo-Pasifik tentang penanggulangan bencana, aksi kemanusiaan, dan resiliensi bencana



Dikemas dengan pemimpin pemikiran regional, organisasi terkemuka, dan peserta yang antusias² dari kawasan Asia Pasifik, enam sesi pembelajaran yang berorientasi pada aksi dan hasil menawarkan diskusi yang dinamis dan menarik dan mengajukan beberapa pertanyaan sulit. Webinar tersebut mengungkapkan beberapa masalah sulit yang perlu ditangani saat kawasan ini berusaha untuk meningkatkan penanggulangan bencana secara keseluruhan termasuk mengidentifikasi, mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan pulih dari bencana, pandemi, dan ancaman masa depan lainnya.

GAMBAR 3. Keenam webinar regional mengeksplorasi beragam permasalahan dalam membangun resiliensi bencana di Asia Pasifik



Apa yang Dibahas?

- 1** Webinar pertama **mengkaji bagaimana pandemi telah mendisrupsi status quo dalam penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan di kawasan ini** termasuk transformasi dinamika kekuasaan dan efek akselerasi pandemi terhadap perubahan penanggulangan bencana.
- 2** Webinar kedua **menilai peran sentral pemerintah daerah dan perubahan peran organisasi lokal selama COVID-19**, dan membahas apakah semua aktor siap untuk perubahan tersebut, dan yang paling penting, apakah perubahan akan bertahan atau status quo sebelum pandemi akan kembali terbentuk setelah situasi normal.
- 3** **Adaptasi di tingkat lokal terhadap pandemi dan peningkatan resiliensi di tingkat lokal terhadap bencana dan krisis dieksplorasi** di sesi tiga; khususnya bagaimana entitas sub-nasional dan perwakilannya berperilaku dan berinteraksi secara internal dan dengan pihak lain dalam konteks penanggulangan bencana
- 4** Sesi empat **menjajaki pemanfaatan teknologi tercanggih yang ada dan keterlibatan perusahaan teknologi** dalam lingkungan yang kompleks di mana lembaga penanggulangan bencana dan kemanusiaan beroperasi.
- 5** Dalam webinar kelima, pembicara berbagi penilaian mereka tentang apa **arti dinamika perubahan bagi sistem dan proses penanggulangan bencana regional dan internasional**, sejauh mana perubahan mendadak ini diinginkan dan berkelanjutan, dan seperti apa masa depannya.
- 6** Dalam webinar terakhir ini, panel melihat tantangan baru yang ditimbulkan oleh kondisi pandemi bagi orang-orang yang **perlu mengakses informasi terkait bencana dan peran media** dalam resiliensi bencana di tingkat masyarakat, termasuk dampak berita palsu.

Seri webinar regional ini menyimpulkan bahwa meskipun pandemi telah menciptakan ruang dan peluang percepatan transformasi penanggulangan bencana, aksi kemanusiaan dan resiliensi bencana, ada tiga faktor yang seringkali bersifat kelembagaan dan sebagian besar sudah ada sebelumnya yang telah memperlambat atau menghambat proses transformasi tersebut. Diskusi online menebar jaring seluas-luasnya dan memperoleh perspektif yang luas tentang dampak COVID-19 terhadap penanggulangan dan resiliensi bencana. Pembicara menekankan bahwa penanggulangan bencana, peningkatan resiliensi bencana, dan aksi kemanusiaan harus mengikuti prinsip yang diakui secara internasional yang dicetuskan oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-Moon, yaitu “selokal mungkin, seinternasional yang diperlukan”.³ Kesimpulan Webinar ini mengkonfirmasi bahwa meskipun pandemi telah menyebabkan kehancuran secara signifikan di seluruh kawasan ini, pendekatan “bisnis seperti biasa” untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana (non-pandemi) berarti ruang dan peluang untuk

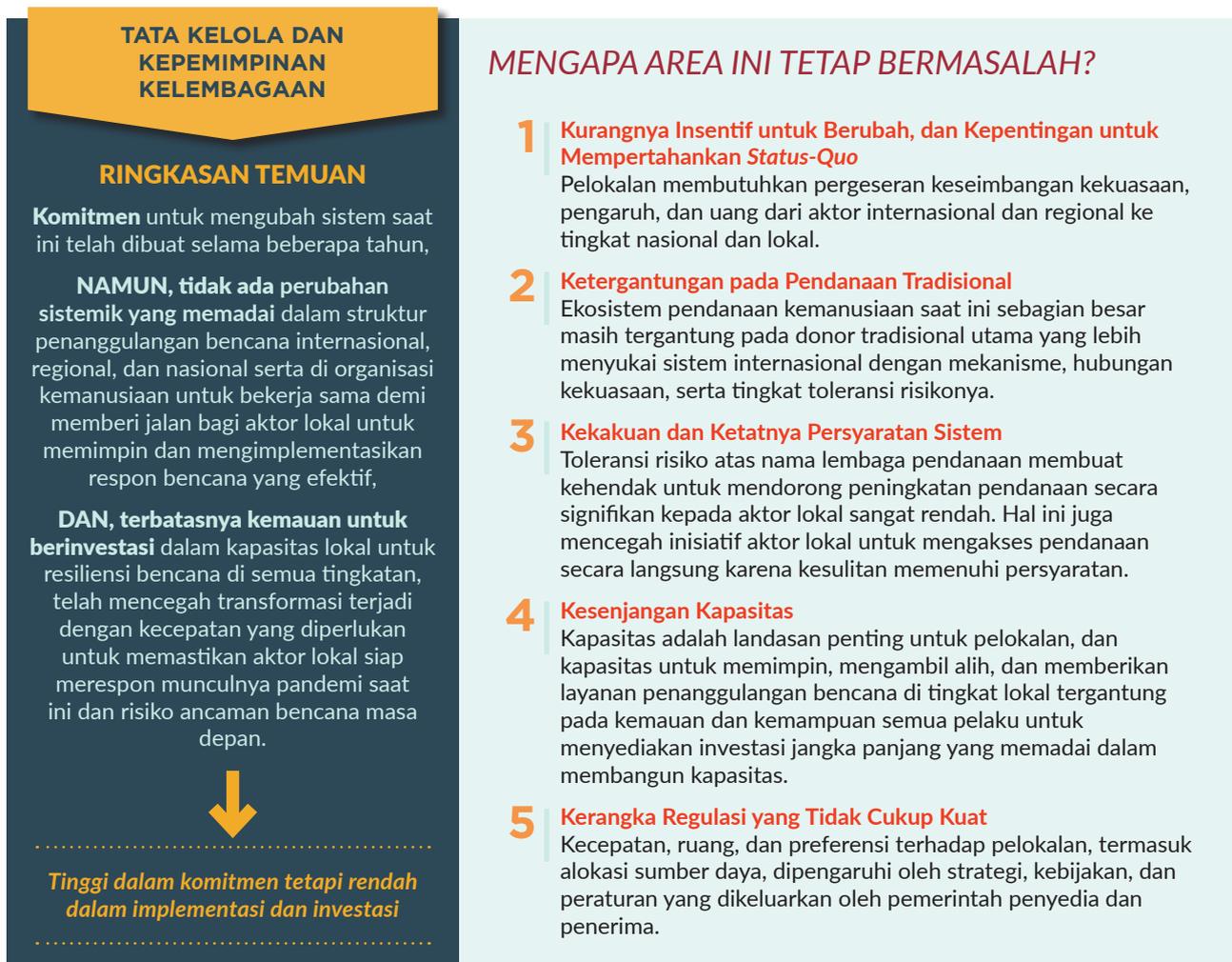
² Lihat Annex 3.

³ Pernyataan Sekjen PBB pada World Humanitarian Summit <https://www.un.org/press/en/2016/sgsm17778.doc.htm>

percepatan transformasi penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan demi memperkuat kepemimpinan lokal dan resiliensi masyarakat harusnya sudah diambil. Pemikiran ini sejalan dengan aspirasi nasional dan sub-nasional di seluruh kawasan ini serta komitmen yang termasuk dalam *Grand Bargain 2015*. Namun, pembicara dalam seri webinar mencatat tiga faktor yang seringkali bersifat kelembagaan dan sebagian besar sudah ada sebelumnya yang memperlambat atau menghambat proses transformasi tersebut. Ketiga faktor tersebut adalah (i) Tata Kelola dan Kepemimpinan Kelembagaan (ii) Model Kemitraan (iii) Teknologi dan Komunikasi.

Tentang Tata Kelola dan Kepemimpinan Kelembagaan. Meskipun komitmen telah dibuat selama bertahun-tahun, tidak ada perubahan yang signifikan dalam struktur penanggulangan bencana internasional, regional maupun nasional serta di organisasi-organisasi kemanusiaan. Ini juga terlihat di bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, untuk memungkinkan penanganan bencana yang efektif yang dipimpin dan dilaksanakan oleh aktor lokal. Hal ini, ditambah dengan terbatasnya kemauan berinvestasi dalam kapasitas lokal untuk resiliensi bencana di semua tingkatan, yang mencegah terjadinya transformasi dengan kecepatan yang diperlukan untuk memastikan aktor lokal siap untuk merespon perkembangan risiko bencana seperti munculnya pandemi saat ini. Meskipun pandemi telah menunjukkan dengan sangat jelas pentingnya kapasitas aktor lokal untuk memimpin upaya tanggap bencana, masih diperlukan penekanan untuk menyesuaikan realitas sadar pandemi saat ini dengan pendekatan teoretis yang sebagian besar berakar pada perspektif pra-pandemi.

GAMBAR 4. Temuan tentang Tata Kelola dan Kepemimpinan Kelembagaan



Tentang Model Kemitraan. Bukti dari webinar menunjukkan bahwa pandemi tidak banyak mengubah paradigma ataupun mendorong partisipasi, kesetaraan, dan kepemimpinan yang lebih besar bagi aktor lokal. Model saat ini berfokus pada prinsip-prinsip dan perjanjian yang sifatnya kontraktual. Meskipun diakui bahwa para aktor lokal memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat yang terkena dampak bencana selama pandemi, perlunya memperluas lingkup, definisi, dan ambisi kemitraan penanggulangan bencana serta penyesuaian kepentingan diangkat adalah masalah-masalah yang harus ditinjau lebih lanjut.

GAMBAR 5. Temuan tentang Model Kemitraan



Tentang Teknologi Digital dan Komunikasi. Penggunaan teknologi telah meningkat secara eksponensial selama pandemi. Hal ini menciptakan momentum untuk mempercepat digitalisasi di sektor penanggulangan bencana dan kemanusiaan untuk mendukung peningkatan resiliensi bencana di tingkat lokal. Namun modal sosial yang berharga ini sebagian besar masih belum dimanfaatkan dan digitalisasi di sektor penanggulangan bencana belum berkembang terlalu pesat.

GAMBAR 6. Temuan tentang Teknologi dan Komunikasi Digital



Sebagai tahap kedua pembelajaran, telah diselenggarakan simposium regional untuk menggali temuan dari webinar untuk menghasilkan basis bukti bagi proses pembelajaran. Untuk mengumpulkan bukti ini, SIAP SIAGA menyelenggarakan simposium regional demi memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan di seluruh kawasan ini untuk mendukung proses tersebut melalui berbagi pengalaman yang terstruktur. Dalam persiapan untuk Simposium, program memprakarsai call for short papers, untuk mendapatkan enam akademisi dan praktisi penanggulangan bencana terpilih yang akan berkonsultasi dengan masyarakat, mendapatkan umpan balik dan perspektif mereka tentang tiga masalah utama hasil diskusi webinar dan berbagi pengalaman yang bisa memperkaya basis bukti lebih lanjut. Makalah-makalah⁴ terpilih dipresentasikan pada Simposium Regional. Simposium tersebut bertujuan mendorong diskusi tentang pembelajaran yang muncul, melibatkan mereka yang mendukung atau menentang temuan awal dari diskusi daring dengan menghadirkan bukti alternatif.

Hasil Simposium Oktober 2021 menjadi dasar Laporan Sintesis ini. Simposium, yang diadakan secara daring pada 27 Oktober, melibatkan sekitar 300 peserta dari 20 negara di kawasan Indo-Pasifik. Sesi diselenggarakan seputar tiga tema dan enam makalah dengan proses yang mengarah pada serangkaian rekomendasi untuk beragam pemangku kepentingan penanggulangan risiko dan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan pandemi.

4 Makalah (rincian di bawah) dapat ditemukan di sini: <https://www.siapsiaga.or.id/knowledge-product/>

- (i) Gabrielle Emery, Asia Pacific Disaster Law Manager, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: **“Laws, Disasters and Public Health Emergencies in Asia Pacific: Lessons from COVID-19”**
- (ii) Adelina Kamal, Konsultan Independen dan mantan Direktur Eksekutif AHA Center: **“Creating a Level Playing Field: Lessons from COVID-19 on improving localisation”**
- (iii) Arshintia, Direktur Unit Pengembangan Kesehatan Masyarakat dan Kemanusiaan YAKKUM: **“Faktor Pendukung Penguatan Kemitraan Lokal: Pembelajaran dari Bethesda Yakkum Care Centre, Yogyakarta”**
- (iv) Nghia Trong Trinh, Vanda Lengkong, Katherine Phillips, Brigitte Rudram, Plan International: **“Increasing Adaptation Capacity of Children, Adolescents and Youth (CAY) in the Context of COVID-19 and Changing Climate through Partnered and Participatory Engagement Approach, and Feminist Principles”**
- (v) Prof. Dra. Fatma Lestari, Devie Fitri Octaviani, Wulan Kusuma Wardani, Andrio Adiwibowo, Rafi Ronny Wazier, Universitas Indonesia: **“Pentingnya Mengintegrasikan Bahasa Daerah dalam Digitalisasi Komunikasi Bencana dan Pandemi untuk Orang dengan Disabilitas di Indonesia: Pembelajaran dari Pandemi COVID-19”**
- (vi) Faizal Thamrin, Humanitarian Data Adviser, Pulse Lab Jakarta: **“Mendukung Pengembangan Sistem Informasi – Studi Kasus Terkait Pandemi di Indonesia”**

“

Salah satu poin yang ingin saya angkat adalah kita mungkin berpikir ini merupakan titik balik menuju pelokalan secara nyata untuk respons kemanusiaan. Maksud saya, di masa inilah sebagian besar organisasi besar mengalami kesulitan untuk mengerahkan personil ke lapangan sehingga mereka harus benar-benar memikirkan beberapa cara baru untuk menjalankan operasi – namun saya tidak tahu apakah kita benar-benar telah mencapai perubahan tersebut.



Andrew Schroeder, Vice President of Research and Analysis, Aid Direct

”

4 | Penanggulangan bencana, Resiliensi Bencana dan Pelokalan selama COVID-19

Penanggulangan bencana dan tanggap bencana yang harus cepat beradaptasi dengan kondisi pandemi mendorong perdebatan tentang regionalisasi dan pelokalan bantuan, yang mempercepat desentralisasi program penanggulangan risiko dan resiliensi bencana. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa COVID-19 adalah gejala luar biasa bagi umat manusia, salah satu pembelajaran utama yang muncul adalah masyarakat kontemporer sebenarnya mampu 'bertindak dengan upaya yang diperlukan' atau mengambil tindakan drastis jika tidak ada pilihan alternatif yang layak.⁵ Di negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, peraturan baru dengan cepat diberlakukan, seringkali dikaitkan ke undang-undang penanggulangan bencana yang telah ada. Bandara, restoran, arena olahraga, tempat ibadah, toko, dan sekolah benar-benar ditutup dalam semalam, dan pergerakan masyarakat sangat dibatasi – semua dimungkinkan karena alasan tindakan ini diterima sebagai hal yang sah dan proporsional.

Negara-negara dapat, atau mungkin lebih tepatnya, dipaksa untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi COVID-19 yang memiliki konsekuensi dan biaya ekonomi yang sangat besar, serta menciptakan risiko resesi ekonomi dan pengangguran yang parah. Pandemi dan respons kita berdampak signifikan pada semua aspek kegiatan manusia di seluruh planet ini. Tetapi seperti kebanyakan peristiwa yang menyebabkan disrupsi, orang-orang dengan kerentanan terbesar yang telah mengalami kesulitan paling parah dan mendapat ujian terberat – dan mereka adalah fokus pembelajaran dalam dokumen ini.

Meskipun pandemi, bencana terus melanda seperti biasa dan menguji kemampuan para pelaku kemanusiaan dan tanggap bencana di semua tingkatan untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana secara tepat waktu, efisien, dan efektif. Sebagaimana disebutkan dalam pengantar, Pusat Riset Epidemiologi Bencana (CRED) mencatat 374 peristiwa bencana alam dan bencana kompleks antara Januari 2020 dan Februari 2022 di Asia dan Pasifik pada *Emergency Events Database*,⁶ tidak termasuk kejadian yang terkait dengan COVID-19. Kejadian ini memiliki dampak kesehatan langsung pada seluruh populasi kawasan ini karena pembatasan sosial dan beban tugas tenaga kesehatan.

Pandemi menegaskan kembali bahwa para pelaku kebencanaan nasional dan sub-nasional dan kompetensi penanggulangan bencana yang mereka miliki adalah tulang punggung untuk membangun resiliensi bencana dan, bila diperlukan, memberikan bantuan. Fakta ini berulang kali dibuktikan ketika pembatasan pergerakan dan sosial, dan kendala lainnya menghambat pendekatan “bisnis seperti biasa” untuk program penanggulangan bencana dan pemberian bantuan internasional, regional, dan nasional. COVID-19 menguji resiliensi masyarakat untuk menangani tantangan luar biasa yang ditimbulkan oleh pandemi dan tanggung jawab tambahan yang mereka pikul untuk memaksimalkan resiliensi mereka terhadap bencana.

⁵ <https://edition.cnn.com/2020/06/20/europe/greta-thunberg-coronavirus-climate-change-trnd/index.html>

⁶ <https://public.emdat.be/data>

Pesan utama dari pembelajaran ini adalah **kita tidak boleh menyalahkan pembelajaran dari pandemi global** ini. Selain rekomendasi simposium yang tercantum pada halaman 1, ada dua kesimpulan utama:

Pertama, pandemi menyoroiti resiliensi bencana yang melekat pada masyarakat dan oleh karena itu pemangku kepentingan penanggulangan bencana perlu berfokus pada dinamika resiliensi bencana di tingkat lokal. Respons lokal, yang bukan hal baru atau tidak biasa, jauh lebih terlihat selama pandemi. Pemangku kepentingan penanggulangan bencana di tingkat lokal dengan cepat merencanakan dan merespon kebutuhan yang muncul, bekerja secara sinergis dengan masyarakat dan otoritas lokal dan dengan demikian memperkuat prinsip “selokal mungkin; seinternasional yang diperlukan” sementara pemangku kepentingan penanggulangan bencana di tingkat lain, meskipun memiliki pendekatan aktif dan inovatif, tidak dapat mengerahkan personil dalam jumlah besar untuk memberikan bantuan.⁷

Kedua, seperti yang telah lama mereka janjikan, para aktor nasional, regional dan internasional perlu secara signifikan mengubah model operasi mereka sehingga mendorong, memberdayakan, dan mempercepat pelokalan. Aktor-aktor ini perlu mengubah praktik kerja mereka untuk memastikan bahwa aktor penanggulangan bencana di masyarakat lokal, baik yang tinggal di perkotaan atau pedesaan, mendapat dukungan yang memadai dalam peran mereka di lini depan. Sumber daya untuk berbagi peran dan kewenangan dengan aktor lokal perlu menjadi prioritas utama. Pengakuan yang layak harus diberikan pada peran kepemimpinan aktor lokal, terutama selama krisis kompleks seperti bencana selama pandemi dengan tujuan agar resiliensi mereka – atau kemampuan untuk bangkit kembali – ditingkatkan semaksimal mungkin.

Meskipun tidak satu pun dari temuan ini baru, kemunculannya sebagai dua kesimpulan utama seharusnya membuat kita semua berhenti sejenak dan bertanya-tanya mengapa masalah ini masih menjadi prioritas utama setelah Agenda Osaka, Hyogo, Sendai, dan World Humanitarian Summit menetapkan rencana dan proses untuk meningkatkan resiliensi bencana dan pelokalan pengambilan keputusan.

Begitu banyak yang dijanjikan; begitu sedikit dipenuhi.

⁷ “Pelokalan” dalam konteks ini didefinisikan sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi penanggulangan bencana dan respons kemanusiaan yang dipimpin secara lokal.

“

Ketika pandemi berlanjut dan membatasi pergerakan masyarakat, saya pikir semakin penting bagi semua aktor kemanusiaan untuk berusaha beradaptasi dan benar-benar mendukung kepemimpinan lokal yang efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.



Stephen Scott, Kedutaan Besar Australia

”

5 | Mengapa perlu fokus pada Resiliensi Bencana di Tingkat Lokal?

Resiliensi bencana adalah sifat dasar yang melekat pada setiap komunitas atau masyarakat dan oleh karena itu upaya “dari luar” untuk memperkuat resiliensi bencana harus dirancang berdasarkan konteks dan modal sosial dan budaya yang telah ada sebelumnya. Proses pembelajaran mengungkapkan kesulitan dengan terminologi. Istilah “membangun resiliensi bencana” memberi kesan perlunya memulai dari awal, yang tidak mencerminkan kenyataan dan berisiko menghancurkan *modal sumber daya* serta modal dan struktur lain yang telah ada di masyarakat, besar atau kecil. Untuk mendukung kesimpulan bahwa model yang berlaku saat ini perlu dirombak, proses pembelajaran mengusulkan untuk tidak memakai istilah “membangun resiliensi bencana”, melainkan mengawalinya dengan menghargai modal sosial, intelektual, dan fisik yang ada dalam komunitas dan masyarakat, lalu kemudian mengidentifikasi cara terbaik untuk mendukung upaya yang didorong secara lokal untuk memperkuat apa yang telah ada sebagai cara untuk memastikan resiliensi di masa depan.

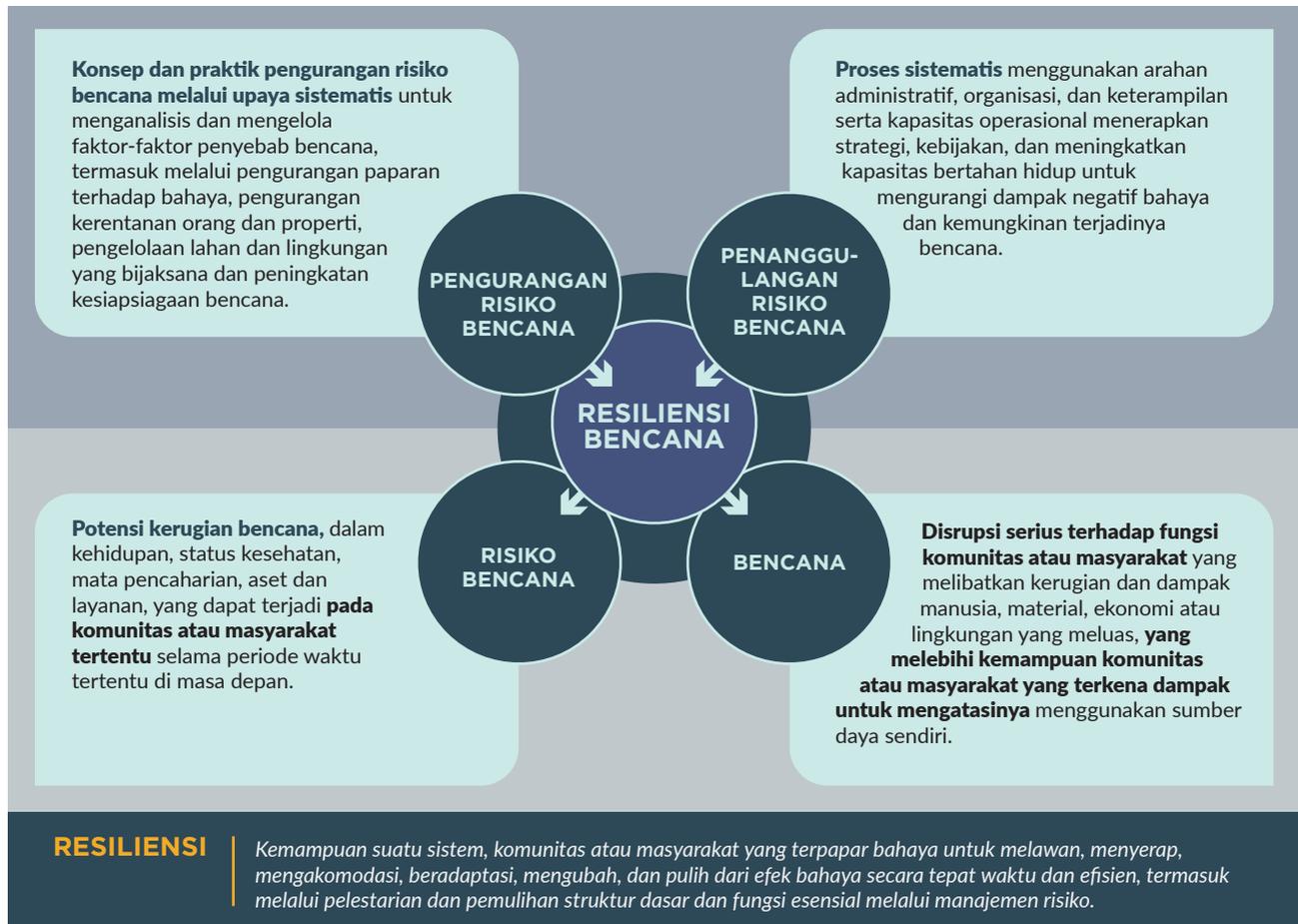
Resiliensi bencana diukur tidak hanya dari segi kemampuan sistem tetapi lebih penting lagi dari kemampuan komunitas atau masyarakat untuk “pulih” dari efek bahaya secara tepat waktu dan efisien. Resiliensi bencana masyarakat “terbentuk” melalui mekanisme bertahan hidup dan langkah-langkah adaptasi. Ada dua “jenis” mekanisme bertahan hidup - mekanisme positif dan negatif dan tiga cara komunitas beradaptasi dengan perubahan keadaan: penyerapan, adaptasi, dan transformasi. Setelah mengalami bencana, orang yang terkena bencana akan “menyesuaikan diri” agar dapat survive dengan memulai mekanisme bertahan hidup, dan langkah-langkah adaptasi. Dalam konteks penanggulangan bencana, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) mendefinisikan resiliensi bencana sebagai “Kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk melawan, menyerap, mengakomodasi, beradaptasi, bertransformasi dan pulih dari efek dari suatu bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dan fungsi dasar yang esensial melalui manajemen risiko.”⁸ Menciptakan atau mendukung resiliensi bencana memerlukan pendekatan yang koheren dan terpadu untuk mengurangi risiko bencana dan mengurangi dampak negatif bahaya.

Gambar 7 menunjukkan teori bahwa kata-kata “bencana” dan “risiko bencana” menggambarkan potensi dan efek merugikan yang sebenarnya dari suatu peristiwa pada komunitas atau masyarakat, sementara “penanggulangan bencana” dan “pengurangan risiko” menggambarkan proses sistematis termasuk analisis, kebijakan dan strategi untuk mengurangi risiko bencana dan mengurangi dampak negatif bahaya. Definisi ini mengasumsikan bahwa masyarakat, yang diwakili oleh komunitas, menghadapi dampak paling buruk dari suatu bencana. Namun peran komunitas atau masyarakat ini tidak diartikulasikan dalam definisi pengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana. Proses pembelajaran berpendapat bahwa kelalaian ini berarti adanya kegagalan kolektif di kalangan pemangku kepentingan penanggulangan bencana

⁸ <https://www.undrr.org/terminology/resilience>

untuk memahami bahwa komunitas atau masyarakat lebih dari sekedar peserta pasif, dan bukan hanya sebagai penerima upaya dan proses sistematis untuk pengurangan risiko yang diberikan kepada mereka melalui metode administratif dan birokrasi.

GAMBAR 7. Siklus Resiliensi Bencana



Semua definisi di atas berasal dari UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction dan website UNDRR

GAMBAR 8. Titik konvergensi resiliensi bencana



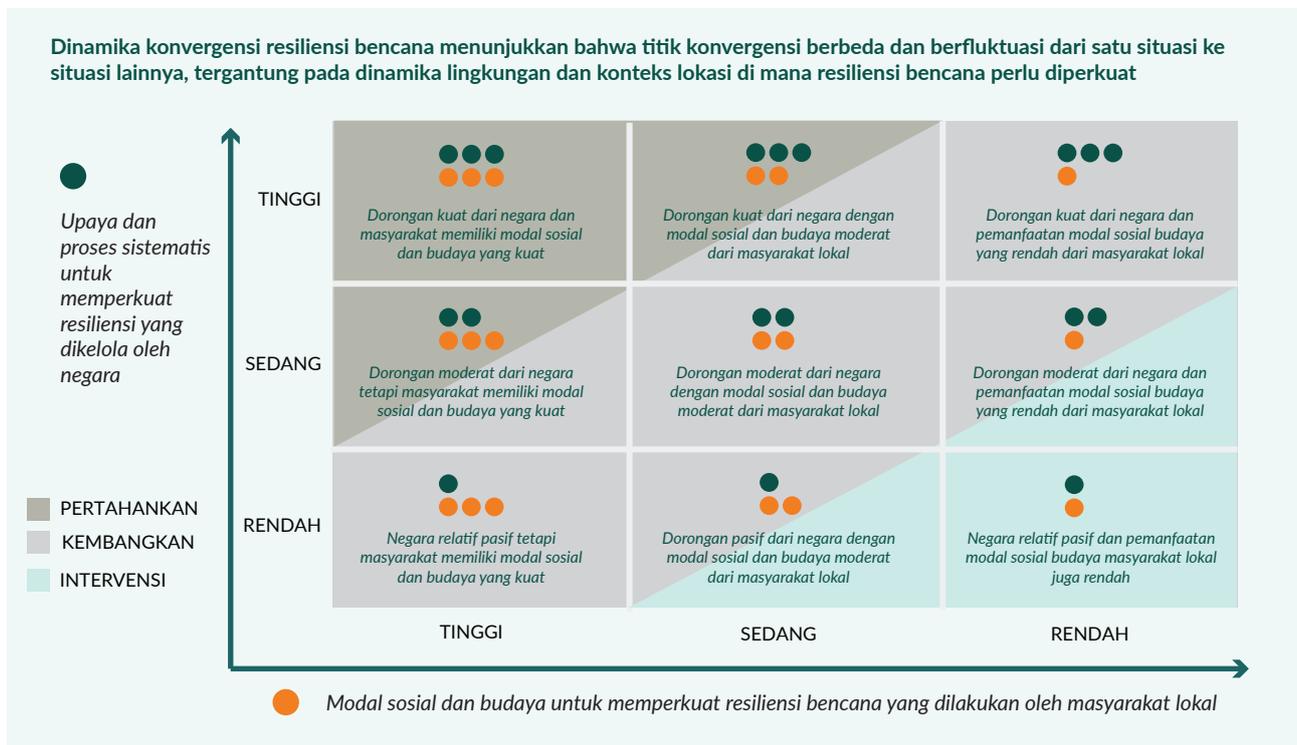
Meskipun negara memiliki peran utama dalam mengurangi risiko bencana, harus disadari bahwa tanggung jawab ini harus dibagi dengan pemangku kepentingan lainnya. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, yang bertujuan untuk secara substansial mengurangi risiko bencana dan kerugian dalam kehidupan, mata pencaharian, dan kesehatan dan aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan dari orang, bisnis, komunitas dan negara, juga mengakui bahwa negara di tingkat nasional memiliki peran utama untuk mengurangi risiko bencana tetapi tanggung jawab ini harus dibagi dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah daerah, sektor swasta dan lainnya.⁹

⁹ <https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework>

Temuan dari proses pembelajaran mendukung pernyataan bahwa resiliensi bencana adalah hasil konvergensi antara upaya dan proses sistematis yang diselenggarakan oleh negara dan modal sosial dan budaya yang diyakini dan dipraktikkan oleh komunitas atau masyarakat (Gambar 8). Dalam banyak kasus, praktik resiliensi bencana yang dihasilkan melalui penerapan pengetahuan dan budaya lokal sudah ada jauh sebelum upaya dan proses sistematis yang diterapkan oleh negara. Analisis yang disertakan dalam makalah akademis yang disiapkan untuk proses pembelajaran ini memperkuat bahwa modal sosial dan budaya sangat kontekstual dan memiliki keunggulan karena menghindari penerapan satu pendekatan untuk semua masalah.

Sebaliknya, sistem pemerintah adalah pendekatan standar yang diperkuat oleh aturan, peraturan, prosedur operasi dan daftar periksa, yang cenderung mengikuti model standar, satu solusi untuk semua masalah.

GAMBAR 9. Dinamika konvergensi resiliensi bencana



Oleh karena itu, titik temu antara upaya dan praktik sistemik yang diselenggarakan oleh negara dengan modal sosial dan budaya di suatu negara, masyarakat atau komunitas cenderung berbeda dengan negara lain. Mencapai resiliensi bencana bukanlah proses yang statis melainkan konvergensi yang dinamis. Contohnya, pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan dapat menggeser komitmen politik dari dorongan kuat untuk upaya dan proses sistematis demi memperkuat resiliensi bencana menjadi dorongan moderat atau bahkan ke keadaan pasif. Demikian pula, transformasi komunitas atau masyarakat dari pedesaan ke perkotaan juga dapat menggeser tingkat modal sosial dan budaya yang diinvestasikan dalam memperkuat resiliensi bencana.

Gambar 9 juga menunjukkan bahwa tingkat dinamika konvergensi yang berbeda memerlukan strategi yang berbeda untuk memperkuat resiliensi bencana. Dalam konteks dorongan yang kuat dari pemerintah dan modal sosial dan budaya yang kuat dari masyarakat lokal, strategi yang diambil adalah mempertahankan kinerja, tata kelola, dan komitmen politik yang ada sambil mencermati tanda-tanda rasa puas diri. Sebaliknya,

di mana negara relatif pasif dan pemanfaatan modal sosial dan budaya masyarakat lokal juga rendah, ada kebutuhan untuk campur tangan dengan sumber daya dan kekuatan eksternal karena kurangnya kemauan dan kapasitas yang diperlukan untuk memperkuat resiliensi bencana. Jadi, kita harus menghindari pendekatan generik untuk membangun resiliensi bencana hanya “karena berhasil di tempat lain”.

Kekurangan dalam wacana saat ini. Pendekatan ini membahas kesenjangan dinamika kekuasaan yang tidak setara di mana *Grand Bargain* mempromosikan pengembangan medan permainan yang seimbang, kesetaraan yang lebih besar dan kemitraan yang lebih setara antara aktor internasional, nasional dan lokal. Kami mengamati bahwa Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana kurang¹⁰ mengelaborasi secara memadai konsep umum resiliensi bencana karena tidak mencakup pengakuan pentingnya modal budaya dan sosial lokal yang ada sebagai fondasi untuk meningkatkan resiliensi bencana. Tentu saja, untuk memastikan bahwa modal sosial dan budaya dihargai dan dipertimbangkan secara memadai, diperlukan penyeimbangan kembali hubungan kekuasaan antara pengelola risiko bencana lini depan dan tingkatan lainnya dan kekuasaan yang melekat dalam sistem penanggulangan bencana dan kemanusiaan saat ini. Kerangka Sendai dan *Grand Bargain* telah mengungkapkan pemahaman tentang perlunya perubahan. Pembelajaran yang disertakan di bawah ini memperkuat kebutuhan untuk berfokus pada penerapan perubahan dan memberikan beberapa petunjuk tentang cara terbaik untuk percepatannya, dengan menggunakan pandemi COVID-19 sebagai akselerator perubahan.

¹⁰ <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>

“

Banyak orang merasa bidang kemanusiaan dan kebencanaan bekerja secara terisolasi dan tidak benar-benar terlibat dengan masyarakat. Di sinilah perusahaan seperti Facebook dan lainnya yang bergerak di bidang ini membuat kontribusi berarti untuk menunjukkan bagaimana mengomunikasikan data dengan lebih baik kepada masyarakat.



Noudhy Valdryno - Politics and Government Outreach Manager Facebook Asia-Pacific

”

6 | Temuan tentang Pelokalan

Kerangka Sendai mendorong pendekatan semua negara dan semua masyarakat untuk penanggulangan bencana yang memfasilitasi partisipasi semua pemangku kepentingan dan menyerukan pemerintah nasional untuk mengikuti serangkaian tindakan untuk meningkatkan resiliensi bencana. Meskipun pemerintah adalah pemegang kewenangan, dampak pandemi pada kapasitas dan kemampuan untuk menangani bencana dan risiko bencana serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan menunjukkan bahwa walau ada kapasitas di tingkat nasional, otoritas nasional perlu menyesuaikan proses dan praktik mereka dalam menyediakan bantuan untuk merespon bencana atau krisis lokal di mana kendala akses merupakan faktor yang kompleks, seperti di negara kepulauan. Konsep bantuan cepat untuk memberikan kapasitas tambahan untuk mendukung otoritas lokal dalam menanggulangi bencana tidak dapat dengan mudah diimplementasikan tanpa meningkatkan risiko paparan penularan penyakit bagi petugas dan masyarakat. Ini dicatat di semua tingkatan.

Dengan demikian, tidak ada pilihan lain selain mengandalkan resiliensi dan sumberdaya kelompok masyarakat terkecil seperti di blok-blok apartemen, jalan-jalan di perkotaan, desa dan dusun di perkampungan, atau di satu kelompok yang terkena bencana yang sama. Memastikan bahwa orang-orang yang tinggal di lokasi-lokasi ini memiliki perlengkapan yang tepat dan memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan ini adalah salah satu prioritas yang muncul dari pembelajaran selama pandemi. Seperti yang dicatat Adelina Kamal

“Investasi untuk pelokalan harus dilakukan tidak hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi lebih penting pada tahap kesiapsiagaan. Bahkan, ini bisa menjadi tempat pelatihan atau ‘inkubator lokal’ untuk melatih LSM lokal skala kecil dan aktor lokal lainnya, untuk mengembangkan kapasitas mereka dan belajar dari satu sama lain, sebelum mereka terlibat dalam tanggap darurat.”

Namun, dia juga menjelaskan bahwa kurangnya definisi yang disepakati tentang “pelokalan” menimbulkan masalah:

“Studi menunjukkan bahwa meskipun hampir ada kesepakatan universal tentang pentingnya pelokalan, tidak ada definisi tunggal pelokalan. Hal ini menyebabkan kurangnya kejelasan atau pemahaman bersama tentang pelokalan. Pada tingkat konseptual, hal ini mempersulit pengukuran pencapaian atau kekurangan pelokalan”.

Pembahasan selama proses pembelajaran ini menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang perubahan transformatif tidak mungkin terjadi kecuali ada perubahan insentif atau disinsentif bagi mereka yang mendapat manfaat terbesar dari *status quo*. *Grand Bargain*, yang disepakati sebagai hasil dari World Humanitarian Summit 2016, juga mengakui perlunya mengintensifkan upaya untuk pelokalan aksi kemanusiaan. Meskipun sebagian besar lembaga kemanusiaan internasional mengadopsi komitmen *Grand*

*Bargain*¹¹ – termasuk *Workstream 2*¹² yang menetapkan komitmen 65 penandatanganan¹³ untuk memastikan “Lebih Banyak Bantuan dan Instrumen Pendanaan untuk Perespon Lokal dan Nasional”, hanya ada sedikit perubahan dalam arsitektur sistem kemanusiaan, sementara langkah-langkah untuk meninjau kembali perdebatan telah mengarah pada pengembangan “*Grand Bargain 2.0*”, dengan hasil yang diinginkan antara lain yaitu:

“Hasil kemanusiaan yang lebih baik untuk populasi yang terkena dampak melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang lebih besar, dalam semangat *Quid pro Quo* yang relevan untuk semua”.¹⁴ Selain itu, usulan yang relatif sederhana yang mendasari pengembangan kemitraan tingkat lokal Yakkum di Jawa Tengah, Indonesia, dilakukan dengan cepat pada awal pandemi.

“Meskipun ada banyak manfaat dan keunggulan yang diakui untuk pengembangan kemitraan, alasan seseorang berusaha membangun kemitraan relatif sederhana. Ada nilai tambah dalam bekerja dengan organisasi lain. Membangun kemitraan yang efektif dan inklusif membutuhkan waktu, dan penting untuk menciptakan kerangka kerja yang tepat sejak awal dan meninjau struktur dan proses kemitraan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalannya”.

Kekurangan dalam proses *Grand Bargain* – setidaknya untuk memenuhi komitmen inti yang dibatasi waktu – sangat jelas terlihat dalam bagaimana aktor lokal masih berjuang untuk mendapatkan akses ke pendanaan internasional; dan bagaimana kemitraan antara aktor lokal, nasional dan internasional terus diwarnai oleh dinamika kekuasaan yang seringkali vertikal daripada horizontal dan sebagian besar tidak mengenali bahwa kesiapsiagaan, respons dan pemulihan selalu “dipimpin secara lokal”.

Pembelajaran ini juga menemukan bahwa sejumlah aktor penting yang harus dipertimbangkan sebagai anggota masyarakat lokal dalam mengembangkan dan memberikan solusi untuk masalah penanggulangan bencana seperti perusahaan swasta terus secara rutin dikecualikan dalam mekanisme koordinasi penanggulangan bencana dan proses pengambilan keputusan, meskipun ada sejumlah contoh di mana partisipasi sektor swasta tersebut telah memberikan manfaat (contohnya dalam kasus the Philippines Disaster Recovery Foundation dan Connecting Business Initiative PBB).

Kemajuan menuju penerimaan pengambilan keputusan yang lebih terlokalisasi tetap tidak terlihat dan tidak dirasakan oleh banyak orang di lapangan - dalam hal kedalaman dan kualitas pendanaan, kesetaraan kemitraan dan investasi jangka panjang baik secara finansial maupun kelembagaan. Pandemi tampaknya tidak mengubah hubungan ini.

¹¹ World Humanitarian Summit. 2016: The Grand Bargain – A Shared Commitment to Better Serve People in Need, https://interagencystandingcommittee.org/system/files/grand_bargain_final_22_may_final-2_0.pdf

¹² <https://interagencystandingcommittee.org/more-support-and-funding-tools-for-local-and-national-responders>

¹³ <https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-signatories>

¹⁴ Overseas Development Institute. 2021: The Grand Bargain at Five Years – an Independent review <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-06/Grand%20Bargain%20Annual%20Independent%20Report%202021.pdf>

6.1 HAMBATAN UNTUK PERUBAHAN

Kurangnya insentif, struktur kekuasaan yang tidak seimbang dalam kemitraan, hambatan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi digital, dan akses ke informasi bencana berkualitas tinggi adalah empat masalah utama yang menghambat penguatan resiliensi di tingkat lokal.

(I) KURANGNYA INSENTIF

Mendukung personil lini depan dan masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memaksimalkan resiliensi mereka membutuhkan pergeseran keseimbangan kekuasaan, pengaruh, dan uang dari aktor internasional dan regional ke tingkat nasional dan akhirnya lokal. Sementara pandemi mungkin menjadi faktor yang berkontribusi untuk mempercepat perubahan, hanya sedikit bukti dari studi ini yang menunjukkan hal itu terjadi. Seperti yang dicatat Adelina Kamal

“COVID-19 bisa menjadi momen penting untuk mempercepat kemajuan signifikan dalam pelokalan. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sehingga dampaknya belum transformasional dan berkelanjutan. Banyak yang percaya bahwa COVID-19 telah “memaksa sistem internasional dan pemerintah tuan rumah untuk lebih mengenali peran unik aktor lokal”.¹⁵ Namun, tidak jelas apakah pengakuan ini akan dilembagakan ke dalam praktik di luar pandemi. Krisis COVID-19 telah menunjukkan bahwa “aktor lokal berada pada posisi terbaik untuk merespon – bahkan ketika menghadapi krisis global”.¹⁶ Namun, pelokalan dilakukan lebih karena kebutuhan, karena “situasi dan bukan pilihan yang telah menghentikan perespon internasional mengambil kepemimpinan”.¹⁷

Selain itu, Jo-Hannah Lavey dari the Humanitarian Advisory Group mencatat dalam sambutannya selama webinar tentang dampak COVID-19 pada organisasi internasional dan regional bahwa

“Faktor-faktor di balik status-quo dan ketidakmampuan untuk berubah secara substansial adalah kekuasaan, insentif, dan struktur yang tertanam dalam sistem kemanusiaan internasional. Mereka tidak mendukung aksi kemanusiaan yang dipimpin secara lokal, dan pendanaan adalah contoh yang sangat jelas dalam hal ini. Sangat sulit bagi aktor lokal dan nasional untuk mendapatkan pendanaan secara langsung dari sistem internasional. Dibutuhkan perantara sekedar untuk administrasi dan menghindari risiko dan hal-hal semacam itu. Dan ini sangat sulit berubah”.

Menariknya, kurangnya insentif di tingkat internasional bukanlah hal yang unik. Hal itu juga terlihat di tingkat nasional. Contohnya, penelitian oleh International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)¹⁸ yang menganalisis undang-undang dan kedaruratan kesehatan masyarakat (PHE) di 130 negara termasuk 16 dari Asia dan Pasifik mencatat bahwa meskipun sebagian besar negara memiliki undang-undang dan kebijakan yang memungkinkan partisipasi entitas dalam pemerintahan dalam PHE, terdapat

¹⁵ Barbelet, V., Bryant, J., Spencer, A. 2021. HPG working paper: Local humanitarian action during COVID-19 – Findings from a diary study. Overseas Development Institute (ODI) Humanitarian Policy Group (HPG). <https://odi.org/en/publications/local-humanitarian-action-during-covid-19-findingsfrom-a-diary-study/>

¹⁶ DA Global. 2021. Literature Review: Is aid really changing? What the COVID-19 response tells us about localisation, decolonisation and the humanitarian system. British Red Cross. <https://www.redcross.org.uk/about-us/what-we-do/international/humanitarian-policy>

¹⁷ Ibid.

¹⁸ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 2021. Law and Public Health Emergency Preparedness and Response: Lessons from the COVID-19 Pandemic. <https://disasterlaw.ifrc.org/media/3010>

suatu fokus pada departemen dan lembaga yang dianggap sebagai aktor 'inti', daripada seluruh lembaga pemerintah, termasuk otoritas lokal, yang mungkin perlu dilibatkan. Faktor-faktor yang berkontribusi, seperti yang dijelaskan oleh Gabrielle Emery dari IFRC, tampaknya merupakan undang-undang PHE yang relatif kuno yang diberlakukan di sejumlah negara

“Sebagian besar undang-undang kesehatan masyarakat, setidaknya sebelum pandemi COVID-19, relatif lama. Bahkan, beberapa berasal dari akhir 1800-an, awal 1900-an. Fakta bahwa sebuah undang-undang sudah tua tidak serta merta membuatnya lemah atau tidak efektif. Undang-undang lama mungkin telah diubah untuk memodernisasinya, sementara masih memiliki tanggal yang sama. Namun, Laporan IFRC menemukan bahwa undang-undang yang lebih tua cenderung tidak mengambil pendekatan ‘semua risiko kesehatan’ dan/atau mereka mungkin secara khusus menargetkan penyakit yang tidak lagi lazim seperti cacar. Ketidaksihinggaan hukum ini mengakibatkan lahirnya peraturan-peraturan yang tergesa-gesa yang tidak serta-merta selalu membangun atau melengkapi sistem yang telah ada sebelumnya”.

Pembelajaran yang berasal dari pandemi memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali undang-undang kedaruratan kesehatan masyarakat dan hubungannya dengan undang-undang penanggulangan bencana. Setelah Tsunami Samudra Hindia 2004, kemajuan yang signifikan dan pesat dicapai untuk menyusun undang-undang baru yang mendukung peningkatan penanggulangan bencana dan resiliensi bencana - tingkat upaya yang sama diperlukan saat kita melihat ke masa depan yang penuh risiko yang tidak pasti, termasuk dari ancaman kesehatan masyarakat yang semakin sering. Diharapkan insentif untuk mempercepat kesiapsiagaan bencana menjadi lebih besar daripada insentif untuk tidak melakukannya.

(II) STRUKTUR KEKUASAAN YANG TIDAK SEIMBANG DALAM KEMITRAAN

Model kemitraan berbasis operasional saat ini untuk penanggulangan bencana dan program kemanusiaan (sebagian besar antara kontraktor dan subkontraktor/penerima kontrak, terlepas dari asal usul para pihak dalam perjanjian) cenderung berfokus pada pemberian bantuan, yang terutama disesuaikan (tetapi tidak selalu) dengan selera risiko dan kebijakan serta prosedur pemberi kontrak. Meskipun dapat dikatakan bahwa ini adalah praktik komersial yang sehat, ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan yang menjadi dasar kesepakatan tersebut membatasi keterlibatan aktor lokal dalam menetapkan agenda, strategi, dan kebijakan mengenai penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan. Hal ini dapat meliputi kebijakan yang tidak tepat atau tidak diinginkan terkait, contohnya, gender, disabilitas, usia, dan variabel lainnya. Sifat hubungan kekuasaan dalam pengaturan ini tidak secara alami mempromosikan diskusi yang bermakna antara para pihak dalam menentukan program yang sesuai dan relevan secara budaya untuk pelokalan dan penguatan resiliensi bencana di masa depan, seiring dengan meningkatnya kompleksitas, seperti yang dialami selama pandemi.

Yakkum menemukan melalui konsultasi pemangku kepentingan mereka bahwa ada faktor dan tantangan yang berkontribusi terhadap kemitraan lokal yang efektif:

Faktor yang berkontribusi:

- (i) Arah strategis untuk memprioritaskan kemitraan dan layanan inklusif.
- (ii) Struktur tim kemitraan dan kepemimpinan yang beragam
- (iii) Interaksi kemitraan: jaringan dan komunikasi
- (iv) Proses kemitraan: peningkatan kapasitas, mobilisasi sumber daya dan inovasi

Tantangan:

- (i) Tantangan untuk menyelaraskan kepentingan,
- (ii) Tidak adanya pemetaan sumber daya yang sistematis,
- (iii) Kesulitan dalam meningkatkan jangkauan atau lingkup layanan secara tepat waktu, dan
- (iv) Kesenjangan interoperabilitas antara kebijakan dan mekanisme koordinasi di lapangan

Mengingat narasi, perspektif, dan tujuan yang berbeda dari organisasi tingkat internasional, regional, nasional dan lokal, proses pembelajaran ini mencatat bahwa menyelaraskan kepentingan di antara para mitra tetap menjadi tantangan paling signifikan dan salah satu prioritas paling mendesak.

Studi ini juga menemukan bahwa untuk memungkinkan dan mendukung mitra lokal untuk tumbuh, mitra regional dan nasional internasional harus menghindari membebani aktor lokal dengan persyaratan administratif dan keuangan yang tidak dapat mereka ikuti, dan yang mungkin dianggap tidak relevan dengan tujuan dan sasaran mereka. Sebaliknya ketika bermitra dengan aktor lokal, mitra nasional, regional dan internasional harus memberikan dukungan program yang meningkatkan kapasitas teknis dan prioritas pengembangan organisasi strategis seperti keterampilan negosiasi, organisasi, manajemen, komunikasi dan kepemimpinan, sehingga mendukung upaya untuk meningkatkan posisi tawar dan kepercayaan diri ketika berurusan dengan aktor nasional, regional dan internasional.¹⁹

(III) HAMBATAN UNTUK MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL

Digitalisasi di sektor kemanusiaan sebagian besar terbatas pada digitalisasi proses bisnis, sedangkan dampak nyata terhadap resiliensi bencana di tingkat lokal hanya akan terjadi jika ada tindakan sistemik untuk mendigitalisasi sistem penanggulangan bencana dan arsitektur kemanusiaan secara keseluruhan. Bukti yang dikumpulkan untuk pembelajaran ini dan yang disoroti dalam literatur lain, tampaknya menunjukkan bahwa, tidak seperti di sektor komersial dan pelayanan publik, sumber daya signifikan yang telah digunakan untuk digitalisasi dalam penanggulangan bencana dan khususnya untuk sektor kemanusiaan sebagian besar terbatas pada digitalisasi proses bisnis. Kemajuan tidak terlalu signifikan dalam mengatasi kebutuhan untuk mendigitalisasi dan mengotomatisasi arsitektur sistem yang lebih baik termasuk, di beberapa negara, untuk investasi yang memadai dalam meningkatkan digitalisasi data perlindungan sosial. Hal ini membatasi dampak transformasional teknologi di sektor lain, seperti peningkatan efisiensi rantai pasokan melalui pendekatan digital “tepat waktu”, atau manfaat signifikan yang terlihat jelas dari penggunaan teknologi dalam sistem kesehatan masyarakat selama pandemi.

Perbaikan transformasional diperlukan untuk meningkatkan koherensi antara “tingkat” sistem yang berbeda, terutama mengingat meningkatnya kejadian kompleks (seperti pandemi). Kita juga harus memastikan literasi digital diutamakan dengan lebih baik di seluruh ekosistem penanggulangan bencana, termasuk memastikan akses ke alat-alat yang relevan di lini depan, yang seringkali menjadi bagian yang paling kekurangan sumber daya dalam ekosistem ini.

Sektor ini juga perlu menyerap pembelajaran secara lebih sistematis dari sektor lain tentang bagaimana digitalisasi telah meningkatkan respons terhadap peristiwa yang kompleks. Negara-negara yang awalnya mempertahankan tingkat kematian per kapita COVID-19 yang rendah tampaknya berbagi strategi yang mencakup pengawasan dini, pengujian, pelacakan kontak, dan karantina yang ketat. Negara-negara dengan tingkat kematian yang relatif tinggi umumnya memiliki tingkat kesadaran yang lebih rendah dalam pelacakan dan penelusuran, kadang-kadang karena stigma yang melekat pada orang yang “terinfeksi”. Skala koordinasi dan manajemen data yang diperlukan untuk implementasi efektif dari strategi-strategi ini – di sebagian besar negara yang berhasil – tergantung pada pengadopsian teknologi digital dan pengintegrasian ke dalam kebijakan dan layanan kesehatan²⁰. Sektor swasta telah mengalami transformasi yang dianggap

¹⁹ Barbelet, V., Bryant, J., Spencer, A. 2021. HPG working paper: Local humanitarian action during COVID-19 – Findings from a diary study. Overseas Development Institute (ODI) Humanitarian Policy Group (HPG). <https://odi.org/en/publications/local-humanitarian-action-during-covid-19-findingsfrom-a-diary-study/>

²⁰ [https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500\(20\)30142-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30142-4/fulltext)

mustahil oleh banyak orang sebelum pandemi²¹. Sebaliknya, kurangnya pemahaman para pembuat keputusan tentang bagaimana alat dan layanan digital dapat meningkatkan penanggulangan bencana, operasi kesiapsiagaan dan tanggap bencana dapat dikatakan telah mengkompromikan efektivitas operasi tersebut.

Pendeknya, kecepatan pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi tantangan penanggulangan bencana tergantung pada peningkatan beberapa aspek fundamental seperti kapasitas manajemen dan analisis data, termasuk untuk para pemimpin senior, dan fokus yang lebih besar pada pemilahan data, termasuk dalam pengumpulan, analisis dan presentasi data. Tentang pemilahan data, Plan International mencatat bahwa

“...pemerintah harus memastikan data yang relevan untuk memungkinkan kemitraan antara anak, remaja, pemuda dan pihak lain dipilah berdasarkan gender, usia dan disabilitas dan menyertakan indikator kesetaraan gender lainnya. Hal ini berdasarkan pada praktik terbaik yang diterima secara internasional yang mensyaratkan data yang terpilah sesuai gender tersedia, dianalisis dan layak pakai di semua aspek kehidupan”.

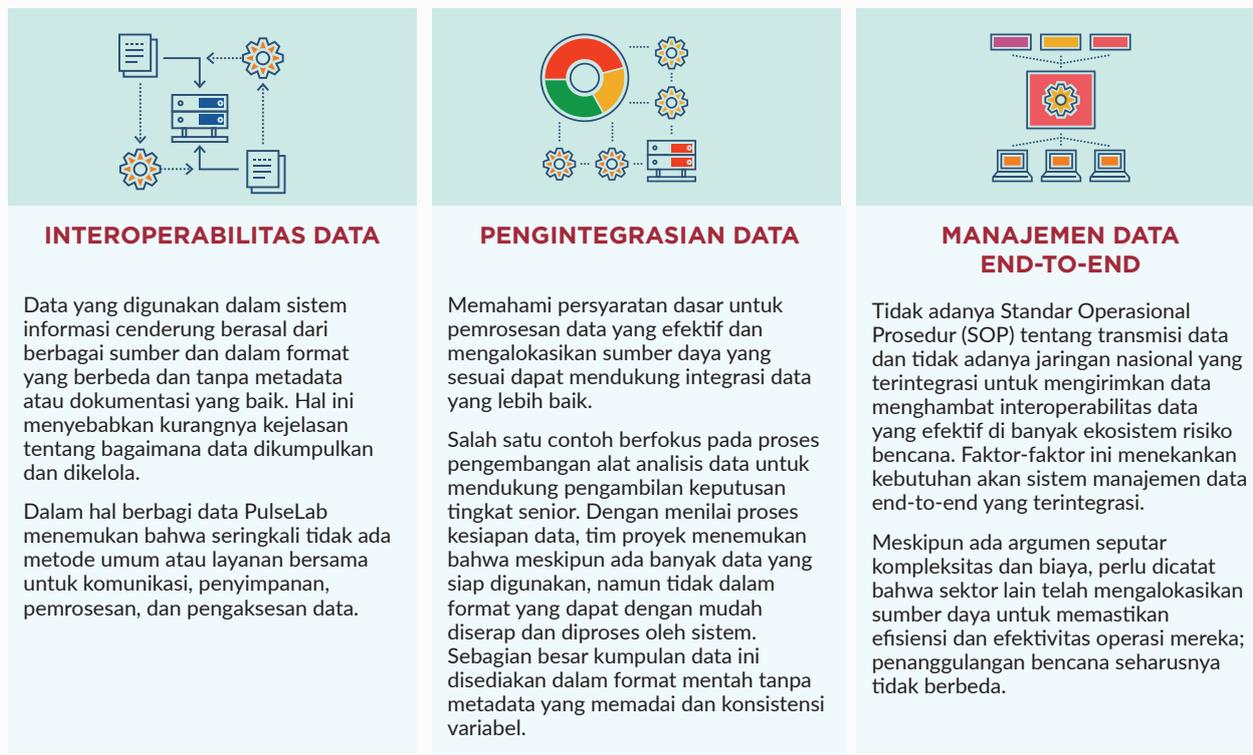
Namun keinginan untuk meningkatkan skala berbagai aspek fundamental ini sangat beragam di berbagai organisasi dan komunitas, seperti halnya kapasitas relatif untuk mengelola data secara real time di berbagai tingkat. Mengacu pada penanggulangan pandemi, Andrew Schroeder dari Direct Relief menjelaskan bahwa

“ada berbagai contoh bagus seputar penggunaan data mobilitas manusia. Kita mengalami situasi kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya [selama pandemi] di mana pemerintah mulai memberlakukan pembatasan sosial yang belum pernah dilakukan dengan skala semacam ini. Tidak ada mekanisme umpan balik yang ditetapkan untuk memahami apakah masyarakat mematuhi hal itu; apa konsekuensinya; dan menggunakan informasi itu sebagai masukan untuk memahami dampak ekonomi lockdown; dampak pada kasus – untuk membuat semacam pemodelan cepat. Kapasitas ini telah dikembangkan melalui sinyal digital yang kita miliki sekarang, dengan miliaran ponsel yang beredar di seluruh dunia. Kemampuan untuk mengumpulkan dan mengelola data itu secara real time adalah pencapaian yang nyata”. Pemanfaatan dan perluasan kemajuan teknologi ini harus menjadi prioritas utama bagi komunitas penanggulangan bencana.

²¹ <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever>

GAMBAR 10. Tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi digital

Penelitian Pulse Lab Jakarta telah mengidentifikasi beberapa isu terkait teknologi digital yang harus diperhatikan oleh mitra penanggulangan bencana di kawasan ini



(IV) MEMAHAMI INFORMASI BENCANA - KEBUTUHAN UNTUK MEMASTIKAN AKSESIBILITAS

Studi ini mencatat bahwa sifat teknis dari informasi bencana dan penyediaannya hanya dalam satu bahasa di negara dengan banyak bahasa daerah menyebabkan kesulitan bagi masyarakat lokal untuk dengan mudah memahaminya dan bertindak. Salah satu studi yang disiapkan untuk pembelajaran ini, yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, mencatat bahwa selama bencana, informasi teknis perlu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal untuk memberikan panduan yang tepat, tepat waktu dan relevan yang mudah diakses dalam bahasa lokal. Bahkan istilah bencana yang sederhana bisa sulit dipahami oleh masyarakat adat. Contohnya, kata “risiko”, yang tidak termasuk dalam bahasa lokal karena masyarakat adat tertentu tidak mendefinisikan atau mengenal konsep “risiko”.

Jika mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang ungkapan “risiko bencana”, komunitas ini akan mengalami kesulitan dalam mencegah dan mengurangnya. Hal ini juga berlaku untuk komunikasi digital di mana penggunaan bahasa dan pengetahuan lokal dalam materi komunikasi digital akan menentukan bagaimana orang bereaksi. Sebagai contoh, studi Universitas Indonesia menemukan bahwa pesatnya pertumbuhan penggunaan komunikasi digital di kalangan penyandang disabilitas tidak diimbangi dengan pengembangan konten yang seharusnya mendukung pengguna dengan hambatan bahasa. Beberapa istilah teknis dalam bencana dan epidemi termasuk risiko, jalur evakuasi, dan vaksinasi masih asing bagi banyak orang. Hambatan bahasa ini dapat menjadi masalah serius bagi mereka yang paling rentan, terutama penyandang disabilitas mengingat mereka membutuhkan akses informasi segera ketika terjadi bencana untuk memastikan bahwa mereka dapat bertindak sedini mungkin mengingat tantangan mobilitas, namun kekurangan akses untuk menghasilkan pendapatan seringkali mencegah mereka mengakses perangkat teknologi.

6.2 PENDORONG PERUBAHAN

Proses pembelajaran ini juga menetapkan empat pendorong utama yang muncul dalam tanggap bencana di kawasan ini selama pandemi yang dapat membantu percepatan pelokalan.

(I) MENINGKATNYA KEINGINAN UNTUK PELOKALAN

Kesulitan pemberian bantuan bencana tanpa meningkatkan risiko penularan penyakit telah mendorong pengambil keputusan untuk mempercepat upaya penguatan resiliensi bencana di tingkat lokal serta mengurangi ketergantungan pada bantuan regional dan internasional. Pandemi telah meningkatkan keinginan di beberapa organisasi global dan regional serta otoritas nasional dan mitra non-pemerintah untuk menyesuaikan bantuan dan layanan sehingga sepenuhnya memperkuat kepemimpinan lokal dalam penanggulangan bencana dan respons kemanusiaan. Hal ini juga mendorong peningkatan wacana oleh lembaga think tank kebijakan dan lainnya. Topan Harald di Vanuatu pada Maret 2020 adalah contoh utama dari perubahan yang terjadi secara *real time*.²²

Peningkatan keinginan ini terlihat dari banyaknya dokumen pedoman dan prosedur yang telah diterbitkan dan/atau diadaptasi oleh organisasi internasional dan regional baik secara eksplisit maupun implisit mendukung pelokalan akibat pandemi COVID-19. Sebagai contoh, Inter-Agency Standing Committee mengeluarkan IASC Interim Guidance on Localization and the COVID-19 Response pada bulan Mei 2020.

Karena “bisnis seperti biasa” memiliki kelangsungan hidup yang terbatas selama pandemi, organisasi internasional dan regional harus mendefinisikan kembali nilai tambah mereka sambil mengakui pentingnya keterlibatan yang lebih kuat bagi para aktor lokal. Panduan diawali dengan menyatakan bahwa “Aktor lokal, termasuk organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta, serta masyarakat itu sendiri (termasuk komunitas pengungsi), sangat penting dalam setiap operasi kemanusiaan, dan terlebih lagi dalam konteks saat ini yang dipengaruhi pembatasan perjalanan dan pergerakan karena COVID-19”. Pesan-pesan kunci yang diberikan panduan ini meliputi:

- **Kemitraan yang bertanggung jawab** berdasarkan kesetaraan, rasa saling menghormati, akuntabilitas bersama, kepercayaan dan pengertian, dan berbagi kapasitas dan informasi (bukan aliran satu arah). Konteks COVID-19 juga memerlukan fleksibilitas tambahan karena kesulitan lingkungan operasi.
- **Mendukung kepemimpinan lokal**, memungkinkan partisipasi lokal yang sistematis dan keterlibatan aktif dalam mekanisme koordinasi dan proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dan sub-nasional, terutama mengenai kontribusi reguler tingkat negara pada revisi Rencana Tanggap Kemanusiaan Global (Global Humanitarian Response Plan).
- **Pendanaan yang fleksibel dan disederhanakan** sangat penting untuk melanjutkan mobilisasi aktor lokal lini depan untuk memberikan bantuan dengan cepat dan efektif dan sebisa mungkin harus diberikan secara langsung.

²² <https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/apr/10/covid-closed-our-borders-to-international-help-after-a-cyclone-but-showed-us-locals-are-the-best-first-responders>

Meskipun ini bukan komitmen baru, pernyataan dalam konteks ini menggarisbawahi potensi yang disediakan pandemi bagi penyedia layanan dan donor non-lokal untuk mengkonseptualisasikan kembali hubungan mereka dengan pelaku penanggulangan bencana di tingkat lokal. Perubahan ini diartikulasikan pada webinar pembelajaran tentang dampak pandemi pada peran sistem penanggulangan bencana regional dan internasional oleh Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan Kantor Regional Asia Pasifik, Markus Werne²³

“Pada posisi kita sekarang, saya jauh lebih optimis bahwa setidaknya sistem regional dan internasional telah mendiskusikan dan memikirkan bagaimana mereka akan bekerja dengan cara yang melengkapi respons yang dipimpin secara nasional untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak. Kuncinya, tentu saja, adalah menyatukan berbagai keunggulan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki semua sistem ini. Jelas bagi kita bahwa mereka yang lebih dekat dengan masyarakat yang terkena dampak memiliki pengetahuan lokal. Mereka juga memiliki kecepatan bertindak dan mengerahkan personil jika diperlukan. Sedangkan mereka yang lebih jauh mungkin membawa praktik terbaik yang tidak langsung terlihat dalam konteks lokal tersebut, seperti pengalaman dari seluruh dunia.”

Tetapi di luar pengamatan ini, meskipun disambut baik, perubahan retorika ini belum diterjemahkan ke dalam perubahan yang terdefiniskan dengan jelas.

(II) PENGALAMAN LOKAL SELAMA PANDEMI

Salah satu dampak positif akibat pandemi adalah meningkatnya kepercayaan diri pemimpin lokal dalam menghadapi bencana dan resiliensi masyarakat di tingkat pemerintahan terendah untuk menghadapi tantangan tanpa bantuan dari luar. Ketakutan akan penularan dan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat menghambat operasi oleh aktor eksternal. Dengan demikian, masyarakat tidak punya pilihan lain selain mengandalkan diri mereka sendiri. Pelajaran dari Topan Seroja, yang melanda provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada April 2021 selama puncak pembatasan sosial berfokus pada hambatan terhadap koordinasi di tingkat lapangan dan pemberian bantuan dari luar.

Kesimpulannya adalah bahwa lebih banyak yang harus dilakukan di tingkat kebijakan untuk menerapkan langkah-langkah yang meningkatkan resiliensi bencana dan mempromosikan pengurangan risiko sebelum bencana dan bahwa langkah-langkah ini harus peka terhadap faktor risiko tambahan – seperti pandemi. Contohnya, dari Topan Seroja, pemerintah daerah di NTT mengetahui bahwa bencana akibat iklim seperti angin topan dapat diprediksi, tetapi sistem peringatan dini harus dipelihara dan diperbarui secara berkala untuk mengurangi dampak dari peristiwa tersebut. Pemerintah daerah juga telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan kapasitas mereka sendiri di bidang ini dan tidak mengandalkan sistem yang diterapkan secara nasional. Prof. Daniel Kameo, Penasihat Gubernur NTT, menjelaskan dalam sesi webinarnya bahwa

“...pembelajaran kedua yang sekarang kita sadari, atau mungkin sudah kita ketahui tetapi tidak pernah benar-benar akui, adalah bahwa bencana dapat diprediksi secara ilmiah, dan tindakan pencegahan tentu saja merupakan cara terbaik untuk mencegah kerusakan akibat bencana alam. Kita mengetahui hal ini tetapi belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tersedia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Sekarang kita tahu bahwa pengetahuan itu ada, teknologinya ada, sebaiknya kita gunakan untuk menghindari atau mencegah kerusakan akibat bencana alam...”

²³ Kepala OCHA Regional Office for Asia and Pacific di Webinar 5 - The Pandemic's Impact on the Role of Regional and International Disaster Management.

Juga diamati dalam rangkaian acara pembelajaran ini banyak kearifan lokal yang terkait dengan mitigasi bencana. Hal ini penting untuk dilestarikan dan, jika memungkinkan, dibagikan kepada orang-orang di kawasan dan negara lain. Contohnya, di beberapa bagian Flores (Provinsi NTT) yang masyarakatnya mengalami tanah longsor, masyarakat mendapat peringatan bukan dari ponsel tapi dari ayam jantan yang mengeluarkan suara tidak biasa dan kemudian masyarakat mengetahui bahwa “akan terjadi sesuatu”.

Kepemimpinan dan koordinasi adalah tantangan utama dalam tanggap bencana di mana banyak pemangku kepentingan terlibat, terutama di mana ada lapisan otoritas dan aktor termasuk aktor lokal, provinsi, nasional dan internasional yang terlibat. Pengalaman serupa di Thailand menunjukkan bagaimana COVID-19 memungkinkan para pemimpin lokal untuk tumbuh dan mendapatkan pengalaman. Panapa Na Nan, Direktur Bagian Kerjasama Internasional di Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, berbicara di webinar kedua, berbagi pengalaman kepemimpinan lokal di Thailand

“Dengan adanya COVID-19, selama bencana dan pembatasan pergerakan terkait, pemerintah daerah dan provinsi memimpin operasi tanggap bencana di bawah pengelolaan gubernur. Dia mengambil alih dan mengaktifkan pusat operasi darurat di tingkat provinsi. Pusat penanggulangan bencana regional, yang merupakan entitas yang dikelola secara nasional, mengambil peran pendukung dan lebih berfungsi sebagai area berkumpul, memberikan dukungan teknis kepada pemerintah lokal dan provinsi. Kepemimpinan yang kuat, tegas dan empatik adalah suatu keharusan. Tentu saja, ketika perjalanan tidak mungkin dilakukan, peran pemimpin lokal menjadi semakin penting.”

(III) KETERGANTUNGAN YANG LEBIH BESAR PADA KETERAMPILAN DAN KAPASITAS ANAK, REMAJA DAN PEMUDA

Dengan tidak adanya bantuan eksternal, masyarakat tampaknya lebih cenderung untuk terlibat dengan anak-anak, remaja dan pemuda. Pandemi juga telah mendorong masyarakat untuk mengandalkan aset mereka sendiri termasuk sumber daya manusia. Yang menarik dari makalah yang disiapkan oleh Plan International untuk pembelajaran ini adalah temuan bahwa tanpa adanya bantuan eksternal, masyarakat tampaknya lebih cenderung untuk terlibat dengan sub-kelompok yang biasanya tidak terlibat dalam situasi bencana seperti anak-anak, remaja dan pemuda.

“Anak, remaja dan pemuda adalah komunikator dampak dan risiko, menginformasikan komunitas mereka (keluarga, teman, sekolah dan jejaring sosial) tentang praktik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mereka juga merupakan agen perubahan yang inovatif, mengidentifikasi cara-cara baru untuk mengatasi dampak perubahan iklim dengan menggunakan aset komunitas yang sudah ada sebelumnya, meningkatkan keselamatan mereka sendiri dan komunitas mereka. Memastikan partisipasi anak, remaja dan pemuda dalam adaptasi perubahan iklim dan PRB juga merupakan peluang untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan generasi pemimpin berikutnya untuk sadar risiko lingkungan hidup”.

Dalam budaya yang sangat hierarkis yang ditemukan di sebagian besar negara di Asia, anak-anak, remaja, dan pemuda sering kali tidak didengarkan. Namun pengetahuan mereka tentang teknologi baru sebagai “digital natives” dengan cepat mengubah budaya ini selama pandemi dan membuka ruang bagi mereka untuk berkontribusi lebih signifikan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan resiliensi. Pendekatan ini mengintegrasikan kapasitas baru di tingkat lokal yang belum dimanfaatkan secara memadai sebelum pandemi.

(IV) MENINGKATNYA JUMLAH PENGGUNA TEKNOLOGI

Komunitas lokal bahkan di tingkat terendah dapat mengakses, terlibat dengan, dan mempengaruhi keahlian dan pengetahuan nasional, regional dan global jika didukung dengan infrastruktur yang tepat seperti listrik dan internet. Wacana selama proses pembelajaran ini, serta secara lebih luas, menegaskan bahwa pandemi telah secara besar-besaran mempercepat penerimaan, penyerapan, dan penggunaan teknologi. Kendala untuk bepergian dan bertemu secara langsung telah menciptakan budaya baru untuk bertemu dan berinteraksi secara virtual di berbagai platform.²⁴ Menanggapi budaya baru itu, berbagai perusahaan telah mempercepat digitalisasi catatan pelanggan dan rantai pasokan operasi internal mereka. Pada saat yang sama, para pengembang telah menanggapi kebutuhan untuk meningkatkan interaksi virtual dengan menciptakan banyak aplikasi baru yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berinteraksi tanpa meningkatkan risiko penularan penyakit. Jane Thomason, Pendiri SuperNova Data, berbicara selama sesi webinar tentang teknologi dan komunikasi, menjelaskan bahwa

“Kita baru saja mengalami percepatan luar biasa (penyerapan teknologi) sejak awal pandemi, karena kita ingin segera mendapat berita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Kita juga melihat bahwa apa pun yang dapat dilakukan dari jarak jauh tiba-tiba dilakukan dari jarak jauh. Baik itu pendidikan atau tele-health atau layanan kesehatan jarak jauh, semua itu terjadi.

Dalam pekerjaan saya tentang teknologi dan dampak sosial di tingkat makro, sektor kemanusiaan selalu berada di depan, contohnya dalam hal penggunaan teknologi untuk melacak pergerakan orang.”

Tetapi budaya dan aplikasi baru ini perlu didukung dengan infrastruktur yang tepat seperti akses ke listrik dan internet untuk memungkinkan komunitas lokal mengakses, terlibat dengan, dan memengaruhi keahlian dan pengetahuan nasional, regional, dan global dengan biaya yang relatif rendah dan dengan kemudahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Hal ini mengajak inovator penanggulangan bencana, aktor kemanusiaan dan jaringan seperti GSMA²⁵ untuk memikirkan kembali apa yang harus dimasukkan dalam keranjang bantuan kemanusiaan mereka, misalnya ponsel dengan alat pengumpulan/pelaporan data opsional yang sudah terpasang, voucher bantuan tunai elektronik, dongle internet dan akses ke tautan messaging groups WhatsApp dan Telegram yang dapat membantu penerima menyampaikan kebutuhan mereka kepada penyedia layanan dan menerima informasi yang tepat waktu, akurat, dan terverifikasi.

²⁴ Proses pembelajaran ini dilakukan tanpa melibatkan 500 orang lebih dalam delapan acara yang diadakan dan tim yang mengelola proses di ruangan yang sama.

²⁵ <https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/mobile-for-humanitarian-innovation/>

“

.....
Semakin banyak orang mendapatkan berita dari media sosial daripada media konvensional. Dengan cara yang sama seperti jurnalisme warga dalam perang di Suriah, kita sekarang memiliki jurnalisme warga dalam bentuk media sosial.



Anne Barker – Indonesia Correspondent, Australian Broadcasting Corporation

”

